

LAPORAN AKTUALISASI

**Judul: Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen di Pusat Analisis
Keparlemenan**



Disusun oleh:

Nama : FARHAN RYANDI
NIP : 199110292024041001
Unit Kerja : PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
Jabatan : ANALIS LEGISLATIF AHLI PERTAMA

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
ANGKATAN XI TAHUN 2024**

Nama : FARHAN RYANDI, S.Kom., M.Sc.
NIP : 199110292024041001
Unit Kerja : PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
Jabatan : ANALIS LEGISLATIF AHLI PERTAMA

Telah diseminarkan Laporan Aktualisasi pada
4 Oktober 2024

Peserta Pelatihan Dasar,



Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
NIP. 199110292024041001

Mengetahui,
Coach



Indra Cakra Buana, M.Si.
NIP. 199010032018011002

Menyetujui,
Mentor



Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
NIP. 198306282009122002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat akal dan nikmat sehat, sehingga Laporan Aktualisasi dengan judul Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen di Pusat Analisis Keparlemenan dalam rangka Pelatihan Dasar Golongan III Angkatan XI Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga disampaikan untuk fasilitator, coach, mentor, dan senior yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan aktualisasi ini. Terima kasih juga untuk segala dukungan yang telah diberikan oleh Kepala Pusat Analisis Keparlemenan, orangtua, keluarga, serta pihak lainnya sehingga laporan aktualisasi ini dapat diselesaikan.

Besar harapan kami, agar laporan aktualisasi ini dapat memberikan pengaruh positif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat Analisis Keparlemenan.

Hormat kami,
Penyusun

Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
NIP. 199110292024041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan	11
D. Manfaat	12
BAB II	13
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	13
A. Visi dan Misi Organisasi	13
B. Struktur Organisasi	14
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	15
D. Ruang Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Analis Legislatif	15
BAB III	19
PENETAPAN ISU PRIORITAS	20
A. Identifikasi Isu	20
a. Analisis Substansi terhadap Isu Strategis dan/atau Aktual dalam Bentuk Ringkasan Isu (Isu 1)	20
b. Tata Kelola Organisasi Pusaka (Isu 2)	21
c. Pengembangan Kompetensi Analis Legislatif (Isu 3)	22
B. Tapisan Isu	25
a. Teknik Tapisan Isu	25
b. Pemilihan Isu Prioritas	26
C. Analisis Isu	27
a. Teknik Analisis	27
b. Penyebab Isu	28
D. Gagasan Pemecahan Isu	29
a. Alternatif Gagasan Pemecahan Isu	29
b. Aktor dan Peran dalam Pemecahan Isu	30
BAB IV	32
RANCANGAN AKTUALISASI	32
A. Matriks Rancangan Aktualisasi	32

B. Jadwal Kegiatan	38
BAB V	40
PELAKSANAAN AKTUALISASI	40
A. Jadwal Aktualisasi	40
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	41
a. Kegiatan 1: Pengumpulan Data Dukung Penyusun Produk Analisis Insidentil dan Independen	41
i. Melakukan studi literatur terhadap terhadap produk analisis eksisting di Pusaka.	41
ii. Wawancara Analis Legislatif di Pusaka (<i>Mentor</i> , Koorbid, Senior)	43
iii. Wawancara Kepala Pusaka	44
iv. Wawancara AKD/Sekretariat AKD	45
b. Kegiatan 2: Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen	46
i. Menyusun sistematika penulisan produk analisis isu aktual	46
ii. Membuat prototipe produk analisis isu aktual	47
c. Kegiatan 3: Implementasi Produk Analisis Insidentil dan Independen	49
i. Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Analis Legislatif di Pusaka (<i>Mentor</i> , Koorbid, Senior)	49
ii. Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Kepala Pusaka	50
iii. Menyampaikan produk analisis isu aktual ke AKD/Sekretariat AKD	51
d. Kegiatan 4: Penyusunan Laporan Rekomendasi terkait Inovasi Produk Analisis yang Bersifat Insidentil dan Independen	53
i. Mengolah testimoni/ tanggapan yang didapatkan dalam penyampaian prototipe dokumen analisis isu insidentil dan independen	53
ii. Menyusun draf/konsep <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk produk analisis isu aktual	55
iii. Menyusun laporan rekomendasi	57
iv. Menyampaikan laporan rekomendasi kepada Kepala Pusaka	58
C. Stakeholder	60
a. Stakeholder Internal	60
b. Stakeholder Eksternal	60
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	61
E. Analisis Dampak	61
BAB VI	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
Daftar Pustaka	63
LAMPIRAN	1
Lampiran 1.a. Formulir Alat Bantu <i>Mentoring</i> Rancangan Aktualisasi	2
Lampiran 1.b. Formulir Alat Bantu <i>Mentoring</i> Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara	6

Lampiran 2. Formulir Alat Bantu <i>Coaching</i>	14
Lampiran 3. Contoh Sistematika Penulisan Produk Analisis Eksisting Isu Sepekan	16
Lampiran 4. Formulir Penguji Rancangan Aktualisasi	17
Lampiran 5. Laporan Singkat Aktualisasi Penyusunan Produk Analisis Ringkasan Aktual	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rumusan temuan isu, kondisi, dan dampaknya	23
Tabel 2. Deskripsi Kriteria <i>Urgency</i>	25
Tabel 3. Deskripsi Kriteria <i>Seriousness</i>	25
Tabel 4. Deskripsi Kriteria <i>Growth</i>	26
Tabel 5. Hasil Tapisan Isu Menggunakan USG (Kotler dkk, 2001)	26
Tabel 6. Matriks Rancangan Aktualisasi	32
Tabel 7. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Pusaka di lingkungan Setjen DPR RI	15
Gambar 2. Salinan PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2022 halaman 1	16
Gambar 3. Hasil Analisis Isu Menggunakan <i>Fishbone Diagram</i> (Ishikawa, 1976)	28
Gambar 4. <i>Template</i> Isu Sepekan	42
Gambar 5. Produk Analisis Isu Sepekan	42
Gambar 6. Konsultasi dengan <i>Mentor</i> dan Senior	43
Gambar 7. Konsultasi dengan Kepala Pusaka	44
Gambar 8. Konsultasi dengan Sekretariat Komisi X dan Senior	45
Gambar 9. Konsep Sistematika Penulisan Produk Analisis Ringkasan Aktual 5W+1H	47
Gambar 10. Prototipe Produk Analisis Ringkasan Aktual 1	49
Gambar 11. Penyampaian Prototipe dan penerimaan tanggapan di Pusaka	50
Gambar 12. Penyampaian sekaligus mendapatkan tanggapan bersama Kepala Pusaka	51
Gambar 13. Penyampaian Ringkasan Aktual kepada Tenaga Ahli Komisi X	52
Gambar 14. Sistematika Penulisan yang telah disesuaikan	54
Gambar 15. Prototipe menggunakan <i>layout</i> yang telah disesuaikan	55
Gambar 16. Laporan Singkat Ringkasan Aktual	58
Gambar 17. Penyampaian Laporan Singkat Ringkasan Aktual ke Kepala Pusaka	59
Gambar 18. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Keahlian	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.a. Formulir Alat Bantu <i>Mentoring</i> Rancangan Aktualisasi	2
Lampiran 1.b. Formulir Alat Bantu <i>Mentoring</i> Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara	6
Lampiran 2. Formulir Alat Bantu <i>Coaching</i>	14
Lampiran 3. Contoh Sistematika Penulisan Produk Analisis Eksisting Isu Sepekan	16
Lampiran 4. Formulir Penguji Rancangan Aktualisasi	17
Lampiran 5. Laporan Singkat Aktualisasi Penyusunan Produk Analisis Ringkasan Aktual	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Aktualisasi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XI Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Laporan Aktualisasi ini merupakan bagian dari tugas Latsar pada Agenda 4, yaitu habituasi.

Agenda habituasi merupakan agenda pembelajaran CPNS untuk mengaktualisasi permasalahan yang terdapat pada unit kerjanya yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Dengan melakukan aktualisasi di dalam unit kerja CPNS tersebut, dapat menyelesaikan masalah eksisting yang ditemukan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan pekerjaan di unit kerjanya.

Setelah bekerja sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) Badan Keahlian Setjen DPR RI terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024 saat dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B/288/KP.03.02/04/2024, ditemukan beberapa isu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Analis Legislatif. Isu-isu yang ditemukan tersebut dirasa dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tupoksi Analis Legislatif di Pusaka. Diharapkan setelah tersusunnya laporan aktualisasi ini, kegiatan-kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada masa habituasi dapat memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja Analis Legislatif sehingga dapat meningkatkan dukungan substansi kepada DPR RI sebagaimana tupoksinya.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor

- 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 12. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 839/SEKJEN/2024 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas Nama Saudara Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc tanggal 1 April 2024;
 14. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B/288/KP.03.02/04/2024 tanggal 2 April 2024 mengenai Calon Pegawai Negeri Sipil mulai melaksanakan tugas pada tanggal 2 Mei 2024;
 15. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara Nomor: 3100/D.3/PDP.03.05 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyelenggaraan Latsar CPNS Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
 16. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B/644/DL.02.01/6/2024 tanggal 19 Juni 2024 mengenai pelaksanaan tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XI yang dilaksanakan pada 24 Juni sampai dengan 5 Oktober 2024.

C. Tujuan

Laporan Aktualisasi ini disusun dengan tujuan untuk menemukan isu dan permasalahan aktual di unit kerja yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusaka Badan Keahlian DPR RI.

D. Manfaat

Laporan Aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Analis Legislatif dalam mendukung substansi kepada DPR RI untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi. Di dalam dokumen Laporan Aktualisasi ini, akan memberikan *output* berupa suatu aktualisasi yang telah diimplementasikan pada unit kerja, terdiri atas kegiatan dan tahapan aktualisasi. Setiap kegiatan dan tahapannya tersebut dilaksanakan pada saat masa habituasi Latsar di unit kerja Pusaka sebagai bentuk inisiatif untuk memitigasi isu dan permasalahan yang ditemukan.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Setjen DPR RI memiliki visi 'Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia' dan untuk mencapai visi tersebut, misi Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

1. memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
3. menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dari laman situs jejaring (*website*) Badan Keahlian DPR RI, ditemukan bahwa Badan Keahlian DPR RI memiliki visi 'Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel' yang merupakan bentuk tanggung jawab dari misi Setjen DPR poin 3, dalam mencapai visi tersebut, misi Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; dan
2. menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

Pusaka yang dahulu bernama Pusat Penelitian (Puslit) yang di dalamnya terdiri dari kelompok jabatan fungsional Peneliti memiliki visi 'Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern'. Dalam mencapai visi tersebut, misi Puslit pada waktu itu adalah sebagai berikut:

1. mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel;
2. memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel; dan
3. melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.

Namun, setelah bertransformasi menjadi Pusaka yang menaungi kelompok jabatan fungsional, di dalamnya terdiri atas Analis Legislatif dan Analis Kebijakan, visi dan misi Pusaka merujuk pada visi dan misi Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun tupoksi Pusaka adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan dukungan keahlian yang prima guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPR RI;
2. menjalankan tata kelola organisasi Pusaka yang profesional, baik dan bersih; dan
3. menyajikan hasil analisis, pendampingan dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI.

B. Struktur Organisasi

Pusaka adalah unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI. Kepala Badan Keahlian memiliki tanggung jawab atas dukungan keahlian kepada Pimpinan DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. Kepala Badan Keahlian bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI dalam hal administrasi.

Di dalam Pusaka, kelompok jabatan fungsional Analis Legislatif dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:

1. Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam);
2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang); dan
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Setiap bidang di atas, dikoordinasikan oleh seorang Koordinator Bidang (Korbid). Korbid bukan merupakan jabatan struktural dan memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas dan pekerjaan setiap Analis Legislatif dibidangnya dengan Kepala Pusaka. Dalam Rancangan Aktualisasi ini, fokus aktualisasi akan berada pada CPNS yang berkedudukan di dalam Kelompok Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat di Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 Kedudukan dan Struktur Organisasi Pusaka di lingkungan Setjen DPR RI di bawah ini.

Kedudukan dan Struktur Organisasi Pusaka di lingkungan Setjen DPR RI



Gambar 1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Pusaka di lingkungan Setjen DPR RI
(sumber: Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusat Analisis Keparlemenan)

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

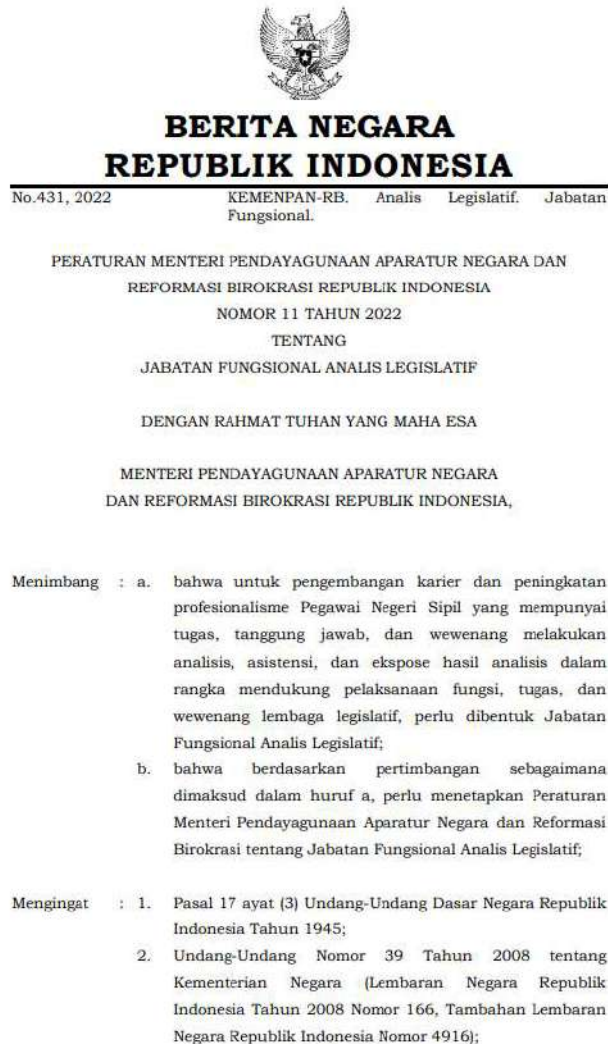
Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, tugas jabatan fungsional Analis Legislatif adalah melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif, yaitu dalam hal ini adalah DPR RI dalam menjalani fungsi pengawasan, anggaran, legislasi, dan diplomasi.

D. Ruang Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Analis Legislatif

Jabatan Fungsional Analis Legislatif merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian, dengan jenjang jabatan terdiri atas: Analis Legislatif Ahli Pertama; Analis Legislatif Ahli Muda; Analis Legislatif Ahli Madya; dan Analis

Legislatif Ahli Utama. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif juga dijelaskan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif, yaitu sebagai berikut:

- a. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:



Gambar 2. Salinan PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2022 halaman 1

- i. analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;

- ii. analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang;
 - iii. analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 - iv. analisis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 - v. analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan;
 - vi. analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 - vii. analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; dan
 - viii. analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan;
- b. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
- i. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
 - ii. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
 - iii. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
 - iv. pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi; dan
 - v. pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual; dan
- c. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
- i. pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di alat kelengkapan dewan; dan
 - ii. pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di publik.

Dalam Laporan Aktualisasi ini, aktualisasi akan ditujukan untuk mengatasi isu dan permasalahan pada pelaksanaan tugas jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama. Adapun uraian kegiatan Analis Legislatif jenjang jabatan Ahli Pertama adalah:

1. melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
2. melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
3. melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
4. melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
5. melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
6. mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
7. melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
8. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
10. menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
11. menelaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
15. menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;
16. menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;

17. memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kalender bekerja sebagai Analis Legislatif Ahli Pertama di Pusaka, telah dilakukan beberapa kegiatan tugas jabatan Analis Legislatif Ahli Pertama yang didelegasikan oleh Kepala Pusaka dan Korbid Kesra. Berdasarkan tupoksi yang telah dijabarkan di atas, ditemukan 3 (tiga) isu yang dirasa cukup menghambat dan/atau menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN, sebagai berikut.

a. Analisis Substansi terhadap Isu Strategis dan/atau Aktual dalam Bentuk Ringkasan Isu (Isu 1)

Produk analisis yang dihasilkan oleh Pusaka yang menjadi tupoksi dari Analis Legislatif Ahli Pertama adalah Isu Sepekan dan Info Singkat. Isu Sepekan merupakan produk analisis substansi yang terbit setiap pekan selama masa sidang yang menyampaikan isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan tugas masing-masing AKD Komisi. Sementara itu, Info Singkat adalah produk analisis substansi yang terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan sepanjang tahun.

Kedua produk analisis ini, berkaitan dengan uraian kegiatan Analis Legislatif Ahli Pertama nomor 7 (tujuh), yaitu 'Melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu'. Pada mekanisme pengerjaannya, berdasarkan informasi yang diketahui sejauh ini, keduanya memiliki tim redaksi masing-masing yang terdiri atas *editor* dan *layouter*. Untuk penulisnya, akan dibuatkan jadwal penulisan untuk setiap Analis Legislatif dari setiap kelompok penugasan AKD Komisi.

Seperti yang diketahui, setiap AKD Komisi, memiliki tugas lebih dari 1 (satu) bidang. Begitu juga dengan kelompok penugasan AKD Komisi yang terdiri dari Analis Legislatif dengan latar belakang keahlian yang berbeda. Isu yang muncul di tengah masyarakat pun bukan merupakan sesuatu yang direncanakan. Kendalanya adalah, seringkali ditemukan bahwa ketika seorang Analis Legislatif sedang tidak dalam gilirannya menulis Isu Sepekan dan/atau Info Singkat, muncul

isu aktual dan/atau strategis di tengah masyarakat yang terkait bidang keahliannya. Sedangkan rekannya yang sedang dalam jadwal menulis memiliki latar belakang keahlian yang berbeda dengannya, sehingga terdapat risiko bahwa analisis substansi terhadap isu tersebut tidak akan sampai kepada DPR RI. Dikarenakan pada saat gilirannya untuk menulis tiba terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu DPR RI sudah mengetahui isu tersebut dan/atau isu tersebut sudah tidak aktual karena sudah ditindaklanjuti.

Oleh karena itu dirasakan perlu untuk melakukan inovasi dengan membuat suatu analisis untuk isu aktual yang cepat tanggap dan bersifat insidentil serta independen di Pusaka. Insidentil dan independen yang dimaksud adalah penulisan yang dilakukan berdasarkan inisiatif dari Analis Legislatif dan Analis Kebijakan di Pusaka yang tidak terpaut jadwal penulisan (fleksibel) dan tidak berdasarkan arahan serta kewajiban, atau dapat dikatakan sebuah produk yang muncul secara *bottom-up* (bukan *top-down*).

b. Tata Kelola Organisasi Pusaka (Isu 2)

Dalam menjalani pekerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Pusaka ini, telah banyak dilakukan koordinasi dengan senior (Analis Legislatif dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi, misal Analis Legislatif Ahli Muda), rekan sesama CPNS, Sub Bagian Tata Usaha Pusaka, dan lainnya baik yang dari unit Eselon I yang sama, maupun yang lain, baik koordinasi yang terkait tupoksi, maupun yang di luar tupoksi. Berdasarkan koordinasi tersebut, ditemukan bahwa adanya kesulitan dalam berkoordinasi di dalam Pusaka yang disebabkan karena kesalahan manajemen/tata kelola organisasi, misalnya untuk menyampaikan keperluan dukungan seperti penyampaian keluhan rusaknya sarana prasarana kantor, diperlukan komunikasi berulang ke individu berbeda di Sub Bagian Tata Usaha. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan disebabkan karena tidak adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di dalam Sub Bagian Tata Usaha. Hal tersebut dirasa perlu untuk melakukan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Organisasi Pusaka, misalnya dengan pembentukan tim Sekretariat, pembagian PIC pekerjaan yang jelas, seperti pekerjaan administrasi dan anggaran. Masalah ini memang di luar lingkup tupoksi dan banyak berkaitan dengan tugas tambahan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masalah ini berada dalam sistem

pendukung manajemen untuk melaksanakan suatu tupoksi, jika terjadi kendala, maka dapat menimbulkan konsekuensi pada hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dari sebuah tupoksi.

c. Pengembangan Kompetensi Analis Legislatif (Isu 3)

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun. Namun, hak dan kewajibannya dalam pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun tersebut seringkali tidak dapat dicapai oleh ASN di lingkungan Setjen DPR RI.

Namun, ditemukan bahwa terdapat senior kami yang menceritakan bahwa ada individu Analis Legislatif di Pusaka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun tersebut. Isu ini dapat mempengaruhi kinerja ASN di lingkungan Setjen DPR RI, karena kesulitan mencari kegiatan pelatihan dan pendidikan atau sejenisnya yang memenuhi persyaratan, dan dapat berdampak pada pengembangan dan pola karier PNS tersebut. Dirasakan perlu untuk mengembangkan *eLearning* dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang bersifat *mandatory* untuk meningkatkan kompetensi pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Setjen DPR RI. Serupa dengan isu sebelumnya, masalah ini juga memang di luar lingkup tupoksi dan banyak berkaitan dengan tugas tambahan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masalah ini berada dalam sistem pendukung manajemen untuk melaksanakan suatu tupoksi, jika terjadi kendala, maka dapat menimbulkan konsekuensi pada hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dari sebuah tupoksi.

Tabel 1. Rumusan temuan isu, kondisi, dan dampaknya

No.	Rumusan Isu	Kondisi Saat Ini (Data & Fakta)	Dampak Apabila Isu Tidak Diselesaikan	Kondisi yang Diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN Mendukung SMART Governance
1	Belum adanya analisis yang bersifat insidentil dan independen	Penulis analisis ditentukan dengan jadwal/secara bergiliran	Penulis dengan keahlian/minat tertentu tidak dapat mengangkat isu aktual yang diminati untuk dianalisis/ disusun ringkasannya	Setiap Analis Legislatif dapat menuliskan ringkasan isu aktual yang tidak terikat jadwal	Dapat selalu menyalurkan kompetensinya di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Analis Legislatif
2	Belum adanya pembagian peran untuk tugas (pokok maupun tambahan) yang baik	Penunjukan pelaksana tugas-tugas masih cenderung subjektif atau tidak didelegasikan dengan baik	Sulit untuk regenerasi penerus koordinasi tugas, dan tidak terintegrasinya informasi substantif dan teknis yang bermanfaat untuk Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka)	Setiap tugas pokok dan tambahan dialokasikan <i>Person In Charge</i> (PIC)/ Sekretaris dari setiap Bidang keahlian yang ada di Pusaka agar dapat menyelesaikan suatu tugas dengan efektif dan efisien, serta dapat mengintegrasikan informasi yang bermanfaat	Dapat bekerja sama/berkolaborasi dengan harmonis antara satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi
3	Belum ada jalur pengembangan kompetensi Analis Legislatif yang terstruktur	Belum ada modul pelatihan yang dapat diikuti Analis Legislatif yang disediakan oleh unit kerja/unit kerja terkait untuk mendukung peningkatan kapasitas Analis Legislatif dalam bekerja	Peningkatan kompetensi Analis Legislatif tidak merata dan cenderung sporadis	Pengembangan kompetensi Analis Legislatif yang terarah	Dapat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya

B. Tapisan Isu

Dari ketiga isu yang ditemukan pada unit kerja sebagaimana disampaikan di atas, akan dipilih satu itu yang akan dianalisis dalam laporan aktualisasi ini dengan melakukan penapisan untuk menentukan isu prioritas.

a. Teknik Tapisan Isu

Pada laporan aktualisasi kali ini, teknik tapisan isu yang akan digunakan adalah USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk mendapatkan isu prioritas yang akan dianalisis. Adapun parameter yang akan digunakan dalam tapisan kali ini akan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Deskripsi Kriteria *Urgency*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
3	Cukup Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
2	Kurang Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
1	Tidak Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu > 1 tahun

Tabel 3. Deskripsi Kriteria *Seriousness*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada satu unit kerja Pusaka dan mitra kerja
4	Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada satu unit kerja Pusaka
3	Cukup Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada satu Bidang Kesra di unit kerja Pusaka
2	Kurang Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada semua analis
1	Tidak Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada individu analis

Tabel 4. Deskripsi Kriteria *Growth*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan
4	Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
3	Cukup Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
2	Kurang Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
1	Tidak Cepat Memburuk	Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun

b. Pemilihan Isu Prioritas

Setelah menentukan parameter yang akan digunakan untuk menapis, berikut hasil tapisan ketiga isu yang telah diidentifikasi menggunakan metode analisis USG.

Tabel 5. Hasil Tapisan Isu Menggunakan USG (Kotler dkk, 2001)

NO.	ISU	URGENSI (U)	SERIOUSNESS (S)	GROWTH (G)	TOTAL SKOR	PERINGKAT PRIORITAS
1	Belum adanya analisis yang bersifat insidentil dan independen	4	5	4	13	I
2	Belum adanya pembagian peran untuk tugas (pokok maupun tambahan) yang baik	3	4	3	10	II
3	Belum ada jalur pengembangan kompetensi Analisis Legislatif yang terstruktur	2	5	2	9	III

Dari hasil tapisan isu menggunakan metode USG di atas, ditemukan bahwa isu yang menjadi prioritas adalah isu yang terkait dengan produk analisis yang bersifat insidentil dan independen. Isu ini menjadi sangat serius

karena Pusaka dapat memberikan dukungan berupa analisis terhadap isu teraktual kepada DPR RI di hari yang sama pada saat permasalahan itu muncul dan/atau *viral* di media. Isu ini dirasa mendesak, karena jika ditangani dengan cepat, DPR RI, utamanya yang akan dilantik pada periode yang baru, akan merasakan dampak atas dukungan yang cepat tanggap. Isu ini pun cepat memburuk jika tidak ditindaklanjuti, khususnya untuk internal Pusaka, karena para Analis Legislatif akan kesulitan untuk menghasilkan analisis yang sesuai keahlian dan minatnya, dikarenakan produk analisis eksisting hanya bisa dilakukan berdasarkan jadwal/giliran. Walaupun, di sisi lain, saat ini sudah terdapat layanan dukungan substansi dari Analis Legislatif kepada DPR RI yang bersifat insidentil berdasarkan permintaan dari Pimpinan atau Anggota DPR RI melalui Kepala Pusaka, yang akan didisposisikan ke Analis Legislatif.

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih dalam laporan aktualisasi ini adalah merancang produk analisis berupa isu aktual harian, dengan rumusan isu: belum adanya produk analisis yang bersifat insidentil dan independen di Pusaka sampai dengan pertengahan tahun 2024.

C. Analisis Isu

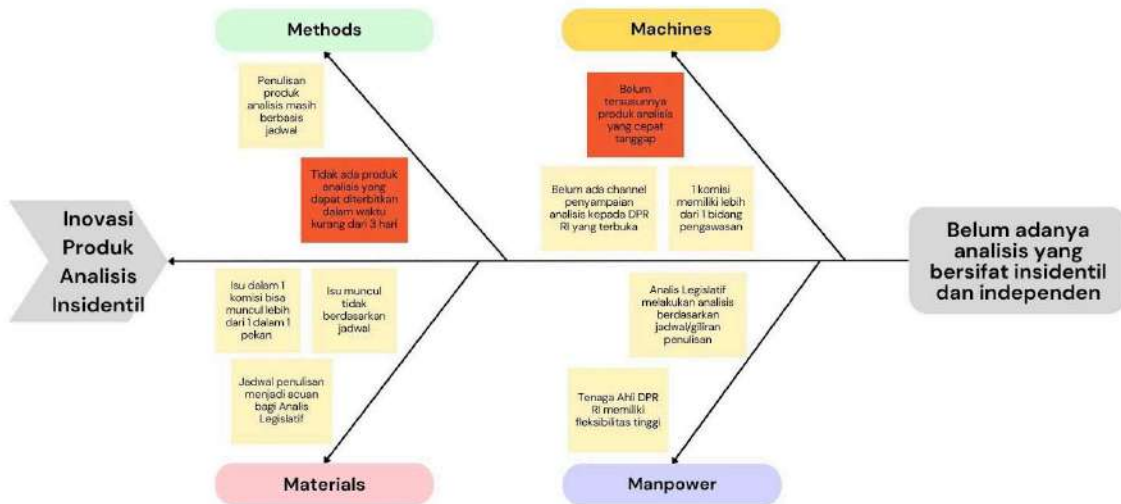
Setelah mendapatkan isu prioritas menggunakan metode analisis USG, yaitu belum adanya analisis yang bersifat insidentil dan independen di Pusaka sampai dengan pertengahan tahun 2024, akan dilakukan analisis terhadap isu prioritas tersebut untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab isu ini muncul.

a. Teknik Analisis

Pada laporan aktualisasi ini, dilakukan analisis isu menggunakan metode *Fishbone Diagram* untuk menemukan hubungan sebab-akibat dari isu yang diangkat dalam laporan aktualisasi ini. Kategori penyebab yang akan dipetakan adalah 4M, yaitu *Methods* (proses dan penyampaian layanan), *Machines* (sistem, peralatan, atau fasilitas terkait pelayanan), *Materials* (bahan mentah, komponen, dan lainnya untuk menghasilkan produk akhir), dan *Manpower* (tenaga kerja pelayanan).

b. Penyebab Isu

Setelah menentukan kategori penyebab dari isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi ini, dilakukan kajian untuk menemukan penyebab-penyebab yang paling mungkin dari isu tersebut, sehingga didapatkan penyebab-penyebab dari isu belum adanya analisis yang bersifat insidentil dan independen adalah sebagai berikut sebagaimana dijabarkan digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 3. Hasil Analisis Isu Menggunakan Fishbone Diagram (Ishikawa, 1976)

1. *Methods* (proses dan penyampaian layanan)
 - a. Penulisan produk analisis masih berbasis jadwal;
 - b. Tidak ada produk analisis yang dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari 3 hari.
2. *Machines* (sistem, peralatan, atau fasilitas terkait pelayanan)
 - a. Belum tersusunnya produk analisis yang cepat tanggap;
 - b. Belum ada *channel* (kanal/jalur) penyampaian analisis kepada

DPR RI yang terbuka;

- c. Setiap komisi memiliki lebih dari 1 bidang pengawasan.
3. *Materials* (bahan mentah, komponen, dan lainnya untuk menghasilkan produk akhir)
- a. Isu yang muncul dalam 1 pekan bisa lebih dari 1 dalam 1 komisi;
 - b. Isu muncul tidak berdasarkan jadwal;
 - c. Jadwal penulisan menjadi acuan Analis Legislatif dalam menyusun produk analisis.
4. *Manpower* (tenaga kerja pelayanan)
- a. Analis Legislatif melakukan analisis berdasarkan jadwal/giliran penulisan;
 - b. Tenaga Ahli DPR RI memiliki fleksibilitas dalam pekerjaan.

c. Analisis Faktor Penyebab Munculnya Core Isu

Dari penyebab-penyebab isu yang paling mungkin dan telah disepakati sebagaimana dijabarkan pada di atas, dapat diambil faktor utama penyebab munculnya isu tersebut (sebab pokok). Sebab pokok dapat ditemukan dengan melihat sebab yang muncul di lebih dari 1 kategori. Dalam *Fishbone Diagram* yang telah disusun, terdapat 1 sebab yang muncul di lebih dari 1 kategori, yaitu belum adanya produk analisis yang cepat tanggap dan dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari 3 hari, penyebab ini muncul pada kategori *Methods* dan *Machines*.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan analisis isu di atas, dari rumusan isu: belum adanya analisis yang bersifat insidentil dan independen di Pusaka sampai dengan pertengahan tahun 2024, telah didapatkan sebab pokoknya, yaitu belum adanya produk analisis yang cepat tanggap dan dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari 3 hari. Maka, alternatif gagasan pemecahan isu serta aktor dan peran yang terlibat adalah sebagai berikut.

a. Alternatif Gagasan Pemecahan Isu

Gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan dalam aktualisasi ini

adalah menyusun sebuah inovasi dalam bentuk rancangan produk analisis Pusaka yang cepat tanggap untuk memberikan masukan ke DPR RI dalam merespons suatu isu aktual yang muncul secara insidental di tengah masyarakat. Dengan alternatif gagasan kreatifnya adalah

- i. memberikan rumusan masalah dan rekomendasi tanggapan serta langkah yang dapat ditempuh dalam produk analisis tersebut;
- ii. memberikan daftar pertanyaan di dalam produk analisis tersebut kepada DPR RI untuk ditanyakan dalam rapat/mediasi; dan
- iii. menyusun rancangan bahan tayang untuk rapat/mediasi sebagai produk analisis.

Jika ditelaah dari ketiga alternatif, yang paling berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Analisis Legislatif adalah memberikan rumusan masalah dan rekomendasi tanggapan serta langkah yang dapat ditempuh dalam produk analisis yang cepat tanggap, karena untuk menyusun daftar pertanyaan diperlukan rumusan isu serta rekomendasi tanggapannya terlebih dahulu dan ini dapat dilakukan oleh pihak terkait, misalnya Sekretariat Komisi terkait atau Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Begitu pula dengan penyusunan rancangan bahan tayang untuk rapat/mediasi, ini dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi terkait maupun Tenaga Ahli terkait. Adapun pertimbangan lainnya adalah waktu pengerjaan, dikarenakan target penyusunan produk analisis ini adalah 1-2 hari setelah isu aktual muncul.

b. Aktor dan Peran dalam Pemecahan Isu

Dalam pemecahan masalah/isu yang diangkat dalam aktualisasi ini, dapat dipetakan aktor terkait dan perannya masing-masing untuk merealisasikan gagasan kreatif yang telah dipilih, yaitu memberikan rumusan masalah dan rekomendasi tanggapan serta langkah yang dapat ditempuh dalam produk analisis yang cepat tanggap. Aktor terkait serta perannya masing-masing adalah

- i. Kepala Pusat Analisis Keparlemenan
Kepala Pusaka memiliki peran dalam memfasilitasi Analisis Legislatif dalam penyusunan analisis isu aktual dengan menetapkan sebuah

produk analisis isu yang baru dan membentuk tim kerja sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan dan penyampaian produk analisis tersebut.

ii. Koordinator Bidang di Pusat Analisis Keparlemenan

Koordinator Bidang di Pusat Analisis Keparlemenan yang terdiri dari Korbid Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam); Korbid Ekonomi, Keuangan, Industri & Pembangunan (Ekkuinbang); dan Korbid Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dapat berperan untuk memfasilitasi Analisis Legislatif yang ingin menanggapi kemunculan isu aktual dengan menyusun analisisnya melalui dukungan administrasi berupa penugasan.

iii. Sekretariat Komisi terkait

Sekretariat Komisi terkait dengan isu ini berperan untuk menerima dan menyampaikan produk hasil analisis isu aktual ini kepada Tenaga Ahli terkait dan/atau Anggota DPR RI terkait.

iv. Tenaga Ahli Sekretariat Komisi terkait dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI terkait

Tenaga Ahli Sekretariat Komisi dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI terkait isu aktual ini dapat menerima, mengolah dan merealisasikan produk hasil analisis isu aktual tersebut menjadi daftar pertanyaan, bahan tayang dan/atau kegiatan tanggapan atas isu itu dalam bentuk rapat/mediasi.

Dari uraian tersebut, gagasan kreatif yang akan disusun dalam aktualisasi ini adalah memberikan rumusan masalah dan rekomendasi tanggapan serta langkah yang dapat ditempuh dalam produk analisis yang cepat tanggap, dengan aktor terkait dan perannya dalam pemecahan masalah ini.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
 Identifikasi Isu : Belum ada analisis insidentil dan independen dari Pusaka
 Isu Yang Diangkat : Tidak ada produk analisis yang cepat tanggap dari Pusaka
 Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan produk analisis insidentil dan independen

Tabel 6. Matriks Rancangan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/ Tujuan Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengumpulan Data Dukung Penyusun Produk Analisis Insidentil dan Independen	Melakukan studi literatur terhadap produk analisis eksisting di Pusaka	Data pendukung penyusun Format Penulisan Produk Analisis Insidentil dan Independen, berupa format penulisan produk analisis eksisting di Pusaka	Akuntabel: Agar rencana aktualisasi yang akan dilakukan memiliki data dasar dan acuan, Kompetensi: Melakukan suatu pekerjaan dengan basis keahlian.	Kode Etik: Diperlukannya data dukung/justifikasi dalam memberikan gagasan, Integritas: Memberikan gagasan dan data dukungnya sehingga dapat dipertanggungjawab-	Memberikan dukungan kepada DPR RI berupa analisis dan ekspose sebagai Analisis Legislatif

				kan	
Menyusun draf sistematisa penulisan produk analisis isu aktual	Analisis, draf Sistematisa penulisan (format/template) produk analisis isu aktual	Adaptif: Berusaha sebaik mungkin dan belajar untuk menyusun sistematisa	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, Entrepreneurship: Melakukan sebuah inovasi untuk produk tulisan di Pusaka.		
Wawancara Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)	Masukan atas rencana produk analisis insidentil dan independen	Akuntabel: Agar rencana aktualisasi yang akan dilakukan memiliki data dasar dan acuan, Kolaboratif: Bekerja sama dengan rekan satu unit kerja untuk mencapai tujuan bersama.	Kode Etik: Diperlukannya data dukung/justifikasi dalam memberikan gagasan, <i>Networking</i> : Mengenali rekan satu unit kerja.		
Wawancara Kepala Pusaka	Masukan atas rencana produk analisis insidentil dan independen	Akuntabel: Agar rencana aktualisasi yang akan dilakukan memiliki data dasar dan acuan, Loyal: Meminta pendapat dari pimpinan.	Kode Etik: Diperlukannya data dukung/justifikasi dalam memberikan gagasan, <i>Hospitality</i> : Melayani pimpinan untuk mendapatkan umpan balik dari rencana aktualisasi yang akan dikerjakan.		

		Wawancara Sekretariat AKD	Masukan atas rencana produk analisis insidentil dan independen	Akunabel: Agar rencana aktualisasi yang akan dilakukan memiliki data dasar dan acuan, Loyal: Meminta pendapat dari mitra kerja internal instansi demi kebaikan instansi.	Kode Etik: Diperlukannya data dukung/justifikasi dalam memberikan gagasan, <i>Hospitality</i> : Melayani mitra kerja internal untuk mendapatkan umpan balik dari rencana aktualisasi yang akan dikerjakan.	
2	Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen	Menyusun sistematisa penulisan produk analisis isu aktual	Analisis, Sistematisa penulisan (format/template) produk analisis isu aktual	Adaptif: Berusaha sebaik mungkin dan belajar untuk menyusun sistematisa	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, <i>Entrepreneurship</i> : Melakukan sebuah inovasi untuk produk tulisan di Pusaka.	
		Membuat prototipe produk analisis isu aktual	Analisis, Prototipe produk analisis isu aktual dari kasus nyata (<i>layout</i> dan karya tulis analisis deskriptif)	Kompeten: Melakukan tugas dan fungsi sebagai Analisis Legislatif dengan membuat analisis isu	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, Integritas: Melaksanakan tugas analisis berdasarkan sistematisa yang sudah disusun dan dapat dipertanggungjawab- kan.	

3	Implementasi Produk Analisis Insidentil dan Independen	Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koordbid, Senior)	Dokumen, Testimoni/ tanggapan dari Analis Legislatif (Mentor, Koordbid, Senior) atas produk analisis isu insidentil dan independen	Berorientasi Pelayanan: Melayani unit kerja dengan sepenuh hati dan menerima masukan agar dapat bekerja lebih baik, Harmonis: Menerima masukan dan memperbaiki kinerja terus menerus.	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, <i>Networking</i> : Mengenal rekan satu unit kerja.
		Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Kepala Pusaka	Dokumen, Testimoni/ tanggapan dari Kepala Pusaka atas produk analisis isu insidentil dan independen	Berorientasi Pelayanan: Melayani pimpinan dengan sepenuh hati dan menerima masukan agar dapat bekerja lebih baik, Harmonis: Menerima masukan dan memperbaiki kinerja terus menerus.	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, Integritas: Melaksanakan tugas ekspose berdasarkan sistematika yang sudah disusun dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Menyampaikan produk analisis isu aktual ke AKD	Dokumen, Testimoni/ tanggapan dari AKD atas produk analisis isu insidentil dan independen	Berorientasi Pelayanan: Melayani mitra kerja dengan sepenuh hati dan menerima masukan agar dapat bekerja lebih baik,	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, Integritas: Melaksanakan tugas analisis berdasarkan

4	Penyusunan Laporan Rekomendasi terkait Inovasi Produk Analisis yang Bersifat Insidental dan Independen	Mengolah testimoni/ tanggapan yang didapatkan dalam penyampaian prototipe dokumen analisis isu insidental dan independen	Analisis, Mengelaborasi semua tanggapan dan masukan yang diterima, menghasilkan analisis dampak produk tersebut dalam mendukung DPR RI menjalankan tugasnya	Harmonis: Menerima masukan dan memperbaiki kinerja terus menerus.	sistematis yang sudah disusun dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Menyusun draf <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk produk analisis isu aktual	Analisis, draf SOP untuk produk analisis isu aktual	Adaptif: Berusaha sebaik mungkin dan belajar untuk menyusun draf SOP untuk produk analisis isu aktual	Kewajiban ASN: Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, <i>Entrepreneurship</i> : Melakukan sebuah inovasi untuk produk tulisan di Pusaka.
		Menyusun laporan rekomendasi	Dokumen, Menjabarkan latar belakang penyusunan produk, sistematis	Akuntabel: Sebagai bentuk pembuktian atas analisis dan rencana aktualisasi yang telah disusun	Integritas: memiliki kompetensi untuk menyusun laporan.

		penulisan, penyusunan prototipe, penyampaian produk, <i>feedback</i> yang didapatkan, dampak produk, dan rekomendasi tindaklanjuti dari prototipe produk tersebut	dan dilaksanakan, Kompetensi: Melakukan suatu pekerjaan untuk memutakhirkan pekerjaannya agar dapat lebih berkontribusi.		
	Menyampaikan laporan rekomendasi kepada Kepala Pusaka	Kegiatan, Penyampaian laporan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti oleh Pusaka	Harmonis: Menyampaikan hasil kerja agar dapat ditindaklanjuti bentuk penerapan pekerjaannya di lingkungan unit kerja, Loyal: Meminta pendapat dari pimpinan.	Kewajiban ASN: loyal kepada instansi/pimpinan, Integritas: memiliki tanggung jawab atas pekerjaan.	

B. Jadwal Kegiatan

Tabel 7. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengumpulan Data Dukung Penyusun Produk Analisis Insidentil dan Independen												
	a) Melakukan studi literatur terhadap produk analisis eksisting di Pusaka												
	b) Wawancara Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)												
	c) Wawancara Kepala Pusaka												
	d) Wawancara Sekretariat AKD												
2.	Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen												
	a) Menyusun sistematika penulisan produk analisis isu aktual												
	b) Membuat prototipe produk analisis isu aktual												
3.	Implementasi Produk Analisis Insidentil dan Independen												
	a) Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)												
	b) Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Kepala Pusaka												
	c) Menyampaikan produk analisis isu aktual ke AKD												
4.	Penyusunan Laporan Rekomendasi terkait Inovasi Produk Analisis yang Bersifat Insidentil dan Independen												
	a) Mengolah testimoni/ tanggapan yang didapatkan dalam penyampaian prototipe dokumen analisis isu insidentil dan independen												

[illegible]

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Aktualisasi

Pelaksanaan aktualisasi selama kurang lebih 2 (dua) bulan kalender telah mencakup tiap-tiap kegiatan beserta tahapannya.

No.	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengumpulan Data Dukung Penyusun Produk Analisis Insidentil dan Independen												
	a) Melakukan studi literatur terhadap terhadap produk analisis eksisting di Pusaka												
	b) Wawancara Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)												
	c) Wawancara Kepala Pusaka												
	d) Wawancara Sekretariat AKD												
2.	Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen												
	a) Menyusun sistematika penulisan produk analisis isu aktual												
	b) Membuat prototipe produk analisis isu aktual												
3.	Implementasi Produk Analisis Insidentil dan Independen												
	a) Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)												
	b) Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Kepala Pusaka												
	c) Menyampaikan produk analisis isu aktual ke AKD												
4.	Penyusunan Laporan Rekomendasi terkait Inovasi Produk Analisis yang Bersifat Insidentil dan Independen												
	a) Mengolah testimoni/ tanggapan yang didapatkan dalam penyampaian prototipe dokumen analisis isu insidentil dan												

independen													
b) Menyusun draf <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk produk analisis isu aktual													
c) Menyusun laporan rekomendasi													
d) Menyampaikan laporan rekomendasi kepada Kepala Pusaka													

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

a. Kegiatan 1: Pengumpulan Data Dukung Penyusun Produk Analisis Insidentil dan Independen

i. Melakukan studi literatur terhadap terhadap produk analisis eksisting di Pusaka.

Sebagai upaya dalam memitigasi isu yang diangkat, tahapan kegiatan ini menghasilkan data dukung untuk menjadi referensi dalam penyusunan format penulisan produk analisis yang bersifat insidentil dan independen. Dalam tahapan kegiatan ini telah dilakukan pengumpulan data dukung dalam bentuk format penulisan produk analisis eksisting di Pusaka, yaitu Isu Sepekan. Adapun *template* penulisan Isu Sepekan yang diisi oleh setiap Analis Legislatif sebagai penulisnya adalah sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 4 di bawah. Isu Sepekan, seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu produk analisis yang disusun oleh 1 (satu) orang Analis Legislatif Ahli Pertama dan Ahli Muda yang terbit setiap pekan di dalam masa sidang DPR RI. Produk analisis ini mengangkat dan menjabarkan suatu isu yang muncul selama 1 (satu) pekan yang terkait pada bidang tugas setiap AKD Komisi. Pada setiap volume Isu Sepekan yang terbit berjumlah sesuai dengan jumlah AKD Komisi di DPR RI, sehingga setiap kelompok penugasan AKD Komisi Analis Legislatif hanya dapat menugaskan 1 (orang) Analis Legislatif Ahli Pertama/Ahli Muda untuk mengangkat 1 (satu) isu yang dilakukan analisis deskriptif-nya pada suatu pekan di dalam masa sidang.

Implementasi tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kode Etik; dan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait dengan nilai

JISU SEPEKAN ^{*)}	
Edisi	Minggu ke... Bulletin... 2022 (tanggal... s.d. ...) Contoh: Minggu ke 1 Bulletin Februari 2022 (tanggal 28 Januari s.d. 3 Februari)
Komis	Ditulis dengan Nama komis yang terkait dengan isu sepekan ini Contoh: Komis V
Penulis	Nama Lengkap: Akbari/Bidang: Pereteli Muda/Polisukam Email: ...@jisu.go.id
Editor	Ditulis dengan nama lengkap editor
Judul	Judul artikel ditulis dengan huruf kapital
Isi/ Permasalahan	Ditulis dengan isu atau permasalahan yang bersifat aktual, Ditulis secara sederhana, informatif dan analitis (jumlah kata antara 350 s.d 600 kata).
Aktoris DPR	Ditulis dengan langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh DPR RI (petisi/kan AKD dan Komisi terkait) dalam menindaklanjuti isu atau permasalahan yang terjadi. Terjadi ditindaklanjuti fungsi DPR (legislatif, pengawasan, dan anggaran) yang sesuai (jumlah kata antara 100 s.d 150 kata).
Sumber Referensi **)	Sumber berita ditulis lebih ringkas, hanya berisi media dan tanggal terbit. Contoh: Media Indonesia, 31 Januari 2021; Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022, tempo.co, 4 Februari 2022; RDP Komisi V tanggal 7 Februari 2022.
Abstrak/ ringkasan untuk ditampilkan di sosmed (Instagram Puslit)	Berisi ringkasan/ingikasan isi tulisan untuk ditayangkan di Instagram Puslit (jumlah kata antara 100 s.d 130).

42

ii. Wawancara Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)

Dalam mengimplementasikan aktualisasi, tahapan kegiatan ini menghasilkan masukan atas rencana pembuatan produk analisis inisiatif yang bersifat insidentil dan independen dari Analis Legislatif di Pusaka. Masukan-masukan yang terkumpul diserap dan dituangkan menjadi draf sistematika penulisan produk analisis. Dalam wawancara bersama mentor dan senior, ditemukan bahwa produk analisis yang dibuat sebaiknya dapat menyampaikan informasi terkait suatu isu secara singkat dan jelas. Produk analisis tersebut tidak memerlukan analisis yang dalam, namun dapat disusun dan disampaikan kepada DPR RI dalam waktu 2 (dua) hari setelah isu itu muncul. Serta, ringkasan tersebut sebaiknya tidak lebih dari 1 (satu) halaman. Di dalam tahapan kegiatan ini juga mendiskusikan terkait rencana pertemuan dengan Sekretariat AKD Komisi X sebagai *pilot project* dalam mengimplementasikan aktualisasi ini.

Implementasi tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kode Etik; dan SMART ASN: *Networking*. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Akuntabel dan Kolaboratif.



Gambar 6. Konsultasi dengan Mentor dan Senior

iii. Wawancara Kepala Pusaka

Dalam tahapan kegiatan ini, output yang dihasilkan adalah masukan atas rencana pembuatan produk analisis inisiatif yang bersifat insidentil dan independen dari Kepala Pusaka. Masukan-masukan tersebut akan diresapi dan diformulasikan ke dalam draf sistematika penulisan produk analisis. Dalam wawancara bersama Kepala Pusaka, ditemukan bahwa pada dasarnya produk analisis yang akan dibuat adalah inisiatif yang baik, namun perlu mempertimbangkan mengenai beban kerja dari masing-masing Analis Legislatif. Beban kerja ini menjadi perhatian Kepala Pusaka sebab jika produk analisis ini diadopsi menjadi produk analisis resmi di Pusaka, akan menambah beban kerja para Analis Legislatif yang eksisting. Diharapkan, produk analisis ini tidak mempengaruhi pemerataan beban kerja yang sudah berjalan dan tertata dengan baik.

Implementasi tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kode Etik; dan SMART ASN: *Hospitality*. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Akuntabel dan Loyal.



Gambar 7. Konsultasi dengan Kepala Pusaka

iv. **Wawancara AKD/Sekretariat AKD**

Tahapan kegiatan ini menghasilkan output dalam bentuk masukan atas rencana pembuatan produk analisis inisiatif yang bersifat insidentil dan independen dari Sekretariat AKD Komisi X. Masukan-masukan tersebut akan dicerna dan diolah ke dalam draf sistematika penulisan produk analisis. Dalam wawancara bersama Sekretariat Komisi X, ditemukan bahwa pada produk analisis yang akan dibuat akan disambut dengan baik oleh Sekretariat Komisi X. Adapun diskusi mengenai mekanisme penyampaian produk analisis yang akan disusun berlangsung lancar. Karena Sekretariat Komisi X cukup luwes dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi bersama Pusaka, misalnya dalam penyampaian produk analisis yang akan disusun ini dapat dilakukan hanya dengan melalui platform pesan instan *WhatsApp*.

Sama seperti pada tahapan kegiatan sebelumnya, implementasi tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kode Etik; dan SMART ASN: *Hospitality*. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Akuntabel dan Loyal.



Gambar 8. Konsultasi dengan Sekretariat Komisi X dan Senior

b. Kegiatan 2: Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen

i. Menyusun sistematika penulisan produk analisis isu aktual

Tahapan kegiatan ini menghasilkan output berupa sistematika penulisan untuk produk analisis yang bersifat independen dan insidentil. Output ini dapat dicapai dengan melakukan analisis terhadap temuan-temuan dari kegiatan sebelumnya yang berupa data dukung hasil wawancara para *stakeholder* terkait produk analisis yang akan disusun. Dikarenakan produk analisis yang akan disusun diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan tepat dan singkat, sehingga dilakukan pendekatan penyusunan sistematika penulisan menggunakan metode yang biasa ditemukan dalam dunia jurnanisme, yaitu 5W dan 1H (*Who*/Siapa, *What*/Apa, *When*/Kapan, *Where*/Di mana, *Why*/Kenapa, *How*/Bagaimana). Adapun konsep sistematika penulisan yang telah disusun dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah. Sistematika penulisan yang telah disusun dirancang agar menghasilkan sebuah dokumen yang singkat dengan panjang tidak lebih dari 1 (satu) halaman.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: *Entrepreneurship*. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Adaptif.

...JUDUL ISU...

Tanggal	Tanggal isu aktual muncul
Komisi	Komisi terkait isu aktual
Penulis	Nama Jabatan Email DPR
Siapa	Diisi dengan pihak-pihak yang terkait dalam isu.
Apa	Diisi dengan peristiwa yang menjadi isu.
Kapan	Diisi dengan waktu terjadi peristiwa tersebut dan/atau dampak waktu yang diakibatkan dari peristiwa tersebut.
Di Mana	Diisi dengan tempat/lokasi peristiwa dan/atau tempat/lokasi kejadian yang akan terjadi di dalam peristiwa tersebut.
Kenapa	Diisi dengan penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut.
Bagaimana	Diisi dengan penjelasan mengenai kondisi saat ini dan/atau dampak dari terjadinya peristiwa tersebut.
Ringkasan	Diisi dengan ringkasan isu atau permasalahan yang bersifat aktual dari poin-poin 5W+1H di atas ke dalam sebuah paragraf. Ditulis secara sederhana, deskriptif, informatif dan analitis (jumlah kata antara 35 s.d 100 kata).
Rekomendasi	Diisi dengan langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh DPR RI (sebutkan AKD dan Komisi terkait) dalam menindaklanjuti isu atau permasalahan yang terjadi. Dapat ditambahkan fungsi DPR (legislasi, pengawasan, dan anggaran) yang sesuai (jumlah kata antara 25 s.d 75 kata).
Sumber Referensi ^{***}	Sumber berita ditulis lebih ringkas, hanya berisi media dan tanggal terbit. Contoh: Media Indonesia, 31 Januari 2021; Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022, tempo.co, 4 Februari 2022. RDPU Komisi V tanggal 7 Februari 2022.

Gambar 9. Konsep Sistematika Penulisan Produk Analisis Ringkasan Aktual Menggunakan pendekatan deskriptif jurnalistik 5W+1H

ii. Membuat prototipe produk analisis isu aktual

Tahapan kegiatan ini menghasilkan *output* berupa *layout* dan prototipe produk analisis yang bersifat independen dan insidentil. *Output* ini dapat dicapai dengan membuat desain dan *layout* menggunakan beberapa referensi terkait unit kerja Pusaka, seperti laman situs jejaring Pusaka; serta melakukan analisis terhadap isu aktual yang ditemukan di media cetak maupun media digital dan ditulis menggunakan sistematika penulisan yang telah disusun pada tahapan kegiatan sebelumnya, sehingga menjadi sebuah produk analisis. Dalam pembuatan *layout* dokumen produk analisis ini, digunakan *tools* desain grafis berbasis situs jejaring Canva. Corak warna yang digunakan pada *layout* dokumen tersebut diadaptasi dari corak warna yang digunakan pada laman situs jejaring unit kerja Pusaka, <http://pusaka.dpr.go.id> yang memiliki warna dominan biru dan kuning. Sebagaimana yang telah dirancang pada tahapan kegiatan sebelumnya, *layout* yang disusun telah didesain berjumlah 1 (satu) halaman ketika sudah disisipkan isi karya tulis analisis

deskriptif yang dibuat oleh penulisnya.

Prototipe produk analisis yang telah tersusun diharapkan dapat dibaca dengan mudah oleh target pembacanya, yaitu Sekretariat AKD Komisi X, Tenaga Ahli Komisi X, Anggota DPR RI Komisi X, maupun masyarakat. Adapun prototipe produk analisis yang telah disusun dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah. Prototipe produk analisis tersebut diberi nama Ringkasan Aktual, dan membahas mengenai masalah yang terjadi pada persiapan pelaksanaan *event* MotoGP Mandalika tahun 2024 di Indonesia. Isu tersebut ditemukan di media cetak dan media digital pada saat prototipe Ringkasan Aktual akan disusun. Dalam penyusunannya, prototipe Ringkasan Aktual ini memakan waktu tidak lebih dari 3 (tiga jam) kerja, namun berbeda dengan pembuatan desain *layout* yang menghabiskan waktu beberapa hari.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Kompeten.



Gambar 10. Prototipe Produk Analisis Ringkasan Aktual dengan Isu Terkini pada saat Penyusunan

c. Kegiatan 3: Implementasi Produk Analisis Insidentil dan Independen

i. Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Analis Legislatif di Pusaka (Mentor, Koorbid, Senior)

Tahapan kegiatan pada kegiatan ini menghasilkan output berupa tanggapan dan masukan dari Analis Legislatif di lingkungan Pusaka terhadap prototipe Ringkasan Aktual yang telah disusun. Penyampaian prototipe Ringkasan Aktual dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Aktualisasi Latsar CPNS di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) lainnya di lingkungan Pusaka. Pada kegiatan tersebut, dihadiri oleh Analis Legislatif Ahli Pertama, Ahli Madya, dan Ahli Utama termasuk Mentor Aktualisasi dan Koordinator Bidang Kesra. Adapun tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh para pihak yang hadir dalam kegiatan

ini adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistematika penulisan agar lebih mudah dibaca;
2. Rekomendasi yang dapat disampaikan di dalam Ringkasan Aktual berupa rekomendasi yang singkat dan langsung mengarah pada Tugas dan Fungsi DPR RI, yaitu Pengawasan, Anggaran, dan Legislasi;
3. Mengubah palet warna yang digunakan pada *layout* produk agar memberikan kesan lebih netral; dan
4. Produk dapat dipublikasikan juga melalui *Website* Pusaka dan *Channel WhatsApp* Pusaka.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: *Networking*. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Berorientasi Pelayanan dan Harmonis.



Gambar 11. Penyampaian dan menerima tanggapan/testimoni Prototipe Produk Analisis Ringkasan Aktual bersama Mentor, Senior, dan Koordinator Bidang Kesra di Pusaka

ii. **Menyampaikan produk analisis isu aktual ke Kepala Pusaka**

Tahapan kegiatan pada kegiatan ini menghasilkan output berupa tanggapan dan masukan dari Kepala Pusaka terhadap prototipe Ringkasan Aktual yang telah disusun. Penyampaian prototipe Ringkasan Aktual dilakukan di Ruang Rapat Pusaka sesaat setelah selesai kegiatan sosialisasi Aktualisasi Latsar CPNS di lingkungan Pusaka yang dihadiri

oleh Kepala Pusaka. Adapun tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh Kepala Pusaka dalam kesempatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selain Isu Sepekan dan Info Singkat, disarankan agar dapat menjadikan produk analisis *Policy Brief* yang dirasa sistematis penulisannya lebih cocok untuk dijadikan acuan, namun dibuat dengan lebih singkat;
2. Dapat menggunakan produk analisis yang dihasilkan oleh *Congressional Research Service* (CRS) di Amerika Serikat sebagai referensi; dan
3. Mengurangi beban analisis dengan mengeluarkan rekomendasi berupa solusi dan strategi di dalam Ringkasan Aktual.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Berorientasi Pelayanan dan Harmonis.



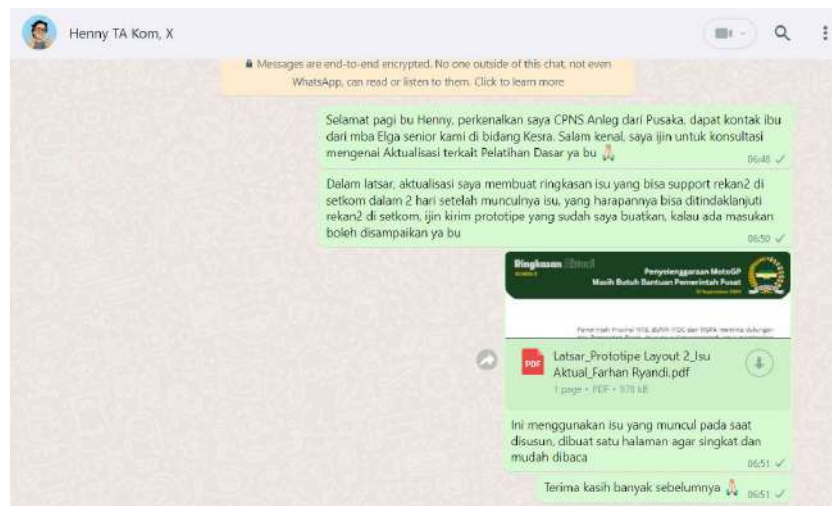
Gambar 12. Penyampaian sekaligus mendapatkan tanggapan/testimoni terhadap produk analisis Ringkasan Aktual kepada Kepala Pusaka

iii. Menyampaikan produk analisis isu aktual ke AKD/Sekretariat AKD

Tahapan kegiatan pada kegiatan ini menghasilkan output berupa tanggapan dan masukan dari Sekretariat AKD Komisi X terhadap prototipe Ringkasan Aktual yang telah disusun dan disampaikan.

Penyampaian prototipe Ringkasan Aktual dilakukan melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp* kepada salah satu Tenaga Ahli (TA) di Komisi X. Adapun tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh TA tersebut adalah bahwa pada dasarnya inisiatif ini disambut dengan baik dan secara desain serta sistematika penulisan, pihaknya akan menerima sebagaimana yang telah disusun dan disampaikan oleh Pusaka. Namun, memang perlu diperhatikan kembali mengenai isu yang akan diangkat ke dalam Ringkasan Aktual, supaya merupakan isu yang memang aktual dan cocok untuk disampaikan dalam bentuk Ringkasan Aktual.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Berorientasi Pelayanan dan Harmonis.



Gambar 13. Penyampaian Ringkasan Aktual kepada Tenaga Ahli Komisi X

d. Kegiatan 4: Penyusunan Laporan Rekomendasi terkait Inovasi Produk Analisis yang Bersifat Insidentil dan Independen

i. Mengolah testimoni/ tanggapan yang didapatkan dalam penyampaian prototipe dokumen analisis isu insidentil dan independen

Di dalam kegiatan ini, pada tahapan kegiatan ini menghasilkan *output* berupa analisis yang mengolah dan mengimplementasikan semua tanggapan dan masukan yang diterima pada kegiatan sebelumnya terkait prototipe Ringkasan Aktual yang telah disusun dan disampaikan. Dari setiap masukan tersebut, setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penyesuaian di dalam sistematika penulisan dan desain *layout* yang telah disusun untuk Ringkasan Aktual. Untuk memfasilitasi tanggapan dan masukan tersebut, maka dilakukan perbaikan/pemutakhiran pada sistematika penulisan dan desain *layout* Ringkasan Aktual seperti yang dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.

Pada sistematika penulisan, pendekatan jurnalisme yang dirasa sedikit sulit untuk dipahami oleh pembaca walaupun dapat ditulis dengan singkat, diubah menjadi narasi yang lebih panjang yang terdiri dari 4 (empat) bagian utama, yaitu masalah, penyebab, dampak, dan rekomendasi. Setiap bagian hanya dapat terdiri atas 1 (satu) paragraf, sehingga diharapkan cukup untuk menyampaikan informasi dengan lebih jelas namun tetap singkat. Pada desain *layout*, dilakukan penyesuaian terhadap masukan yang telah diterima, yaitu mengganti corak warna desain yang digunakan menjadi corak warna yang lebih netral, maka corak warna yang telah disesuaikan adalah corak warna yang diadaptasi dari warna seragam Badan Keahlian DPR RI yang cenderung berwarna hijau tua. Selain itu, penyesuaian pun dilakukan dengan memperhatikan perubahan pada sistematika penulisan yang telah diperbaiki.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Peran ASN; dan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait

dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Akuntabel dan Kompeten.

...JUDUL ISU...

Tanggal	<i>Tanggal Isu Aktual muncul</i>
Komisi	<i>Komisi terkait isu aktual</i>
Penulis	<i>Nama Jabatan Email DPR</i>
Masalah	<i>Diisi dengan ringkasan masalah dari isu yang diangkat, sepanjang 1 paragraf. Ditulis secara sederhana, deskriptif, dan informatif. (jumlah kata antara 35 s.d 70 kata)</i>
Penyebab	<i>Diisi dengan penyebab yang melatarbelakangi munculnya masalah dari isu yang diangkat, sepanjang 1 paragraf. Ditulis secara sederhana, deskriptif, informatif dan analitis. (jumlah kata antara 35 s.d 70 kata)</i>
Dampak	<i>Diisi dengan dampak yang dapat disebabkan oleh isu yang diangkat. Ditulis secara sederhana, deskriptif, informatif dan analitis. (jumlah kata antara 35 s.d 70 kata)</i>
Rekomendasi	<i>Diisi dengan tugas dan fungsi DPR RI (legislasi, pengawasan, dan anggaran) yang cocok untuk menindaklanjuti isu ini, serta jabaran singkat dari langkah yang perlu diambil oleh DPR RI (sebutkan AKD dan Komisi terkait) dalam menindaklanjuti isu atau permasalahan yang terjadi, sepanjang 1 kalimat. (jumlah kata antara 25 s.d 50 kata).</i>
Sumber Referensi ^{**)}	<i>Sumber berita ditulis lebih ringkas, hanya berisi media dan tanggal terbit. Contoh: Media Indonesia, 31 Januari 2021; Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022, tempo.co, 4 Februari 2022. RDPU Komisi V tanggal 7 Februari 2022.</i>

Gambar 14. Sistematika Penulisan yang telah disesuaikan



MASALAH	Pemerintah Provinsi NTB, BUMN ITDC dan MGPA meminta dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya Kemenparekraf untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 hingga 29 September 2024. Dukungan yang diharapkan berupa pembayaran hosting fee senilai 231 miliar rupiah.
PENYEBAB	Pemerintah NTB belum dapat membayarkan hosting fee dikarenakan sedang memfokuskan anggaran untuk berpartisipasi di dalam PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024. Kemenparekraf juga adalah pihak yang membayarkan hosting fee MotoGP Mandalika pada tahun 2022 senilai 78,8 miliar rupiah, namun menjadi temuan BPK dengan justifikasi bahwa tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenparekraf.
DAMPAK	Jika hosting fee tidak dibayarkan kepada Dorna Sports selaku pemegang lisensi olahraga MotoGP, MotoGP seri Mandalika pada tahun 2024 terancam gagal diselenggarakan. Hal ini akan menjadi catatan buruk bagi Indonesia di mata internasional karena telah gagal menjadi tuan rumah penyelenggara event olahraga internasional bergengsi hanya karena dana.
REKOMENDASI	Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat meminta Kemenparekraf agar dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 untuk menemukan solusi penyelesaian pembayaran hosting fee sehingga MotoGP dapat diselenggarakan dengan baik.
SUMBER	CNN Indonesia, 12 September 2024; Bisnis Indonesia, 9 September 2024.



Gambar 15. Prototipe menggunakan *layout* yang telah disesuaikan

ii. Menyusun draf/konsep Standard Operating Procedure (SOP) untuk produk analisis isu aktual

Tahapan kegiatan pada kegiatan ini menghasilkan output berupa rancangan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk produk analisis Ringkasan Aktual dengan melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang terkait alur kerja yang ideal untuk Ringkasan Aktual yang bersifat insidentil dan independen. Rancangan SOP Ringkasan Aktual yang disusun merupakan sebuah narasi singkat yang terdiri dari tahapan dan alur kerja untuk menghasilkan produk

analisis Ringkasan Aktual. Adapun rancangan SOP untuk Ringkasan Aktual adalah sebagai berikut.

SOP untuk penyusunan produk analisis Ringkasan Aktual

1. Analis Legislatif Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama dapat menyusun/menulis Ringkasan Aktual.
2. Penyusun/penulis Ringkasan Aktual terdiri dari 1 (satu) orang.
3. *Person In Charge* (PIC) Ringkasan Aktual ditunjuk oleh Koordinator Bidang, paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang.
4. PIC Ringkasan Aktual bertugas untuk mengumpulkan setiap Ringkasan Aktual yang sudah disusun, dan dikoordinasikan kepada Koordinator Bidang.
5. Tidak ada jadwal penugasan penulisan khusus dalam menyusun produk analisis Ringkasan Aktual.
6. Isu yang diangkat dalam penyusunan Ringkasan Aktual adalah isu yang cukup strategis untuk diangkat dan perlu direspon dengan cepat oleh DPR RI, namun tidak cukup strategis untuk dianalisis lebih dalam dan disusun dalam bentuk produk analisis eksisting, seperti Isu Sepekan dan Info Singkat.
7. Ringkasan Aktual disusun dalam 1x24 jam semenjak isu itu muncul di tengah masyarakat yang dapat dihitung semenjak isu itu rilis pada referensi yang menjadi acuan.
8. Penulisan Ringkasan Aktual mengikuti sistematika penulisan dan template layout yang telah disepakati dan dilampirkan dalam SOP ini.
9. Ringkasan Aktual yang telah disusun, disampaikan ke Koordinator Bidang masing-masing Analis Legislatif melalui PIC Ringkasan Aktual di setiap bidang untuk disampaikan kepada Kepala Pusaka agar mendapatkan persetujuan dalam meneruskan ke AKD/Sekretariat AKD terkait isu tersebut dalam waktu 1x24 jam.
10. Setelah mendapatkan ACC, produk analisis Ringkasan Aktual disampaikan kepada AKD/Sekretariat AKD melalui kanal penyampaian yang telah disepakati bersama masing-masing AKD/Sekretariat AKD. Selain itu, Ringkasan Aktual yang telah disusun juga dapat disampaikan ke tim Pusaka yang menangani website dan channel WhatsApp Pusaka.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: *Entrepreneurship*. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Adaptif.

iii. **Menyusun laporan rekomendasi**

Tahapan kegiatan pada kegiatan ini menghasilkan *output* berupa laporan yang menjabarkan dengan singkat hasil pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan, serta melampirkan sistematika penulisan yang telah disusun, prototipe produk yang telah ditulis menggunakan sistematika penulisannya, dan prototipe produk yang ditulis yang telah menjadi produk analisis final menggunakan desain dan *layout* yang telah dirancang, termasuk SOP untuk produk analisis Ringkasan Aktual yang telah disusun. Laporan tersebut ditulis dengan mengadaptasi format laporan singkat yang biasa digunakan untuk rapat-rapat. Laporan singkat ini diharapkan dapat menjadi bukti pelaksanaan aktualisasi untuk unit kerja Pusaka, dan menjadi referensi untuk menindaklanjuti aktualisasi ini menjadi kebijakan di dalam unit kerja. Laporan singkat aktualisasi ini dapat dilihat selengkapnya pada lampiran laporan aktualisasi ini.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Akuntabel dan Kompeten.



LAPORAN SINGKAT
AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS MENGENAI
PENYUSUNAN PRODUK ANALISIS INSIDENTIL DAN INDEPENDEN
PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN – BADAN KEAHLIAN DPR RI

CATATAN/KESIMPULAN

Dengan ini menyampaikan bahwa aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang dilaksanakan dengan judul: Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen di Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) telah menghasilkan rancangan sistematika penulisan dan rancangan *layout* produk analisis insidentil dan independen yang disebut dengan Ringkasan Aktual. Dalam aktualisasi ini juga, telah disusun prototipe Ringkasan Aktual dan rancangan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk produk analisis tersebut.

Rancangan sistematika penulisan dan rancangan layout Ringkasan Aktual yang telah disusun adalah perubahan atas masukan-masukan yang telah diterima. Bersama dengan laporan singkat ini, terlampir 4 (empat) dokumen yang disebutkan di atas. Diharapkan, laporan ini dapat bermanfaat untuk Pusaka dan Analisis Legislatif (Anleg) yang bernaung di dalamnya, sehingga dapat memberikan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI lebih baik lagi ke depannya, serta mempertajam kemampuan analisa Anleg di kemudian hari.

Jakarta, 2 Oktober 2024
Penyusun Laporan,
CPNS Analisis Legislatif Ahli Pertama

Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
NIP. 19911029 202404 1 001

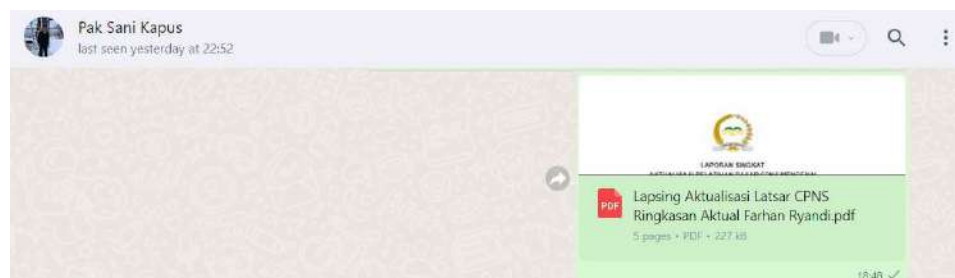
Gambar 16. Laporan Singkat Ringkasan Aktual

iv. Menyampaikan laporan rekomendasi kepada Kepala Pusaka

Tahapan kegiatan pada kegiatan ini menghasilkan *output* berupa penyampaian laporan singkat terkait aktualisasi yang telah dilaksanakan yang mengangkat produk analisis Ringkasan Isu sebagai gagasan pemecahan isu yang ada di lingkungan Pusaka. Penyampaian dilakukan secara fisik dan daring melalui aplikasi pesan instan *WhatsApp*. Hal ini juga menjadi tindak lanjut dari pesan yang telah disampaikan Kepala Pusaka pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I dan II Badan Keahlian DPR RI yang diselenggarakan pada 19 September 2024, bahwa direncanakan tahun depan akan ada produk analisis baru yang

akan dibuat Pusaka untuk dapat menyalurkan informasi ke Pimpinan DPR RI secara berkala atau bahkan harian. Ini menjadi salah satu pertanda bahwa Ringkasan Isu sangat mungkin diadaptasi dan diimplementasikan menjadi kebijakan di lingkungan Pusaka.

Implementasi pada tahapan kegiatan ini berkaitan dengan Manajemen ASN: Kewajiban ASN; dan SMART ASN: Integritas. Sedangkan, terkait dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini perlu mengimplementasikan nilai dasar: Harmonis dan Loyal.



Gambar 17. Penyampaian Laporan Singkat Ringkasan Aktual ke Kepala Pusaka secara daring



Gambar 18. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Keahlian Triwulan I dan II Tahun 2024

C. Stakeholder

a. Stakeholder Internal

- i. Kepala Pusat Analisis Keparlemenan
Kepala Pusaka sebagai penanggung jawab dari setiap dukungan layanan substansi kepada Pimpinan/Anggota DPR RI.
- ii. Koordinator Bidang di Pusat Analisis Keparlemenan
Koordinator Bidang sebagai koordinator setiap Analis Legislatif di bidangnya di lingkungan Pusaka.
- iii. Analis Legislatif
Analis Legislatif sebagai pengguna daripada sistematika penulisan dan *template/layout* yang telah disusun dalam aktualisasi ini, yang memiliki tupoksi dalam memberikan dukungan substansi kepada Pimpinan/Anggota DPR RI.

b. Stakeholder Eksternal

- i. Sekretariat Komisi terkait
Sekretariat Komisi sebagai mitra kerja Pusaka dalam memberikan dukungan layanan kepada Anggota DPR RI dalam lingkup AKD Komisi.
- ii. Tenaga Ahli Sekretariat Komisi terkait dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI terkait
Tenaga Ahli Sekretariat Komisi dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI sebagai mitra kerja Analis Legislatif dalam hal yang bersifat substansi di dalam dukungan pelayanan kepada Pimpinan/Anggota DPR RI.
- iii. Pimpinan dan/atau Anggota DPR RI
Pimpinan dan/atau Anggota DPR RI sebagai penerima manfaat dan pengguna dari dukungan keahlian yang disampaikan oleh Analis Legislatif di Pusaka Badan Keahlian DPR RI.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

a. Resistensi dari Analis Legislatif

Dikarenakan *output* dari aktualisasi ini akan menjadi sebuah produk analisis yang dapat diklasifikasikan ke dalam tupoksi Analis Legislatif, sehingga besar kemungkinan akan dianggap menjadi tambahan tugas bagi para Analis Legislatif dan akan banyak yang menolak untuk menjalankannya. Beberapa senior pun menyatakan pendapat bahwa produk ini akan menambah beban tugas Analis Legislatif. Namun, yang ditekankan dalam produk ini adalah jadwal penulisan yang fleksibel dan tidak berdasarkan arahan serta kewajiban, atau bersifat inisiatif.

b. Penyusunan SOP, Sistematika, dan *Layout*

Di dalam penyusunan SOP, Sistematika dan *Layout* penulisan dokumen yang baik sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pihak yang akan menggunakan produk analisis tersebut adalah kegiatan yang memerlukan kompetensi khusus. Misalnya, di bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan SOP, jurnalistik dalam menyusun sistematika penulisan, maupun desain grafis dalam membuat *layout*. Namun, hal-hal ini dapat dipelajari dengan mandiri, dan masih dapat dikembangkan di kemudian hari ketika akan diadaptasi menjadi kebijakan di lingkungan Pusaka.

E. Analisis Dampak

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dan tahapan yang dirumuskan dalam Laporan Aktualisasi ini adalah:

1. Jangka Pendek: Dapat menumbuhkan inisiatif Analis Legislatif dalam menyusun produk analisis.
2. Jangka Menengah: Dapat mempertajam insting Analis Legislatif dalam membaca situasi/isu aktual yang muncul di tengah masyarakat.
3. Jangka Panjang: DPR RI akan merasakan dampak/manfaat lebih dari kinerja Badan Keahlian, khususnya Pusaka, dalam mendukung substansi tugas dan fungsi DPR RI.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Aktualisasi dalam Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen di Pusat Analisis Keparlemenan ini disusun agar dapat direalisasikan setiap kegiatan dan tahapannya. Laporan Aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi awal untuk menjadi Pusaka yang lebih baik kedepannya, sehingga dapat memberikan analisis substansi kepada DPR RI yang merespons isu aktual yang mencuat di tengah masyarakat.

B. Saran

Hasil dari aktualisasi ini yang berupa SOP penulisan, sistematika penulisan, dan *layout* produk analisis Ringkasan Aktual dapat ditinjau kembali sebelum diimplementasikan menjadi kebijakan dan produk analisis dari Pusaka. Dikarenakan ketiga output tersebut disusun oleh 1 (satu) orang Analis Legislatif Ahli Pertama, untuk mendalaminya, dapat melibatkan/menghadirkan disiplin-disiplin ilmu terkait masing-masing *output* tersebut. Seperti bidang manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan SOP, jurnalistik dalam menyusun sistematika penulisan, maupun desain grafis dalam membuat *layout*. Termasuk melibatkan Analis Legislatif pada jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi (Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama; jika diperlukan).

Daftar Pustaka

1. BK DPR RI. (n.d.). *Visi-dan-Misi-BAGIAN-ADMINISTRASI-BADAN-KEAHLIAN*. DPR RI.
<https://bk.dpr.go.id/setjen/index/id/Visi-dan-Misi-BAGIAN-ADMINISTRASI-BADAN-KEAHLIAN>
2. Pusaka. (n.d.). *Laporan Kinerja Pusat Analisis Keparlemenan Tahun 2023*.
3. Pusaka. (n.d.). *Visi dan Misi Pusat Analisis Keparlemenan*. Pusat Analisis Keparlemenan. <https://pusaka.dpr.go.id/tentang/visimisi>
4. *Tentang Sekretariat Jenderal*. (n.d.). DPR RI. <https://dpr.go.id/setjen/tentang>
5. Wikipedia. (2005, May 15). *Five Ws*. Wikipedia. Diakses pada Oktober 14, 2024, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws

LAMPIRAN

Lampiran 1.a. Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
NIP : 199110292024041001
Unit Kerja : PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Tidak ada produk analisis yang cepat tanggap dari Pusaka

Kegiatan 1: Pengumpulan Data Dukung Penyusun Produk Analisis Insidentil dan Independen

Penyelenggaraan Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Melakukan studi literatur terhadap produk analisis eksisting di Pusaka, seperti Isu Sepekan, Info Singkat, dan <i>Policy Brief</i> . Setelah itu dapat dilaksanakan penyusunan draf sistematika penulisan produk analisis isu aktual dalam bentuk <i>template</i> dan prototipe. Kemudian dapat dilakukan wawancara kepada Analis Legislatif di Pusaka, seperti Mentor, Koordinator Bidang, dan Analis Legislatif lainnya terkait produk analisis isu aktual yang disusun. Hal yang sama dikonsultasikan bersama Kepala Pusaka dan Sekretariat Komisi X.	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu	Sebagai upaya dalam memitigasi isu yang diangkat, kegiatan ini menghasilkan: data dukung/referensi penyusun format penulisan Produk Analisis Insidentil dan Independen dalam bentuk format penulisan produk analisis eksisting di Pusaka; analisis dan draf sistematika penulisan produk analisis isu aktual; dan masukan atas rencana produk analisis insidentil dan independen.	
Keterkaitan Substansi mata Pelatihan	Kegiatan ini terkait pada nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN, yaitu: Kode Etik, Integritas, Kewajiban ASN, <i>Entrepreneurship</i> , <i>Networking</i> , <i>Hospitality</i> .	
Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Misi Badan Keahlian DPR RI salah satunya adalah 'Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI', dan salah satu tupoksi Pusaka adalah 'Menyajikan hasil analisis, pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI', sehingga kegiatan	

	ini memberikan kontribusi pada kedua hal tersebut.	
Penguatan Nilai BerAKHLAK	Melalui pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya, kegiatan ini terkait pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Akuntabel, Kompeten, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.	

Kegiatan 2: Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Monitor	Paraf Monitor
Tahapan Kegiatan	Pada kegiatan ini dapat dilakukan penyusunan sistematika penulisan produk analisis isu aktual berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan pada kegiatan sebelumnya. Setelah sistematika penulisan tersusun, dapat dilakukan penyusunan prototipe produk analisis isu aktual berdasarkan isu yang muncul pada saat itu.	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu	Sebagai upaya dalam memitigasi isu yang diangkat, kegiatan ini menghasilkan: analisis dan sistematika penulisan produk analisis isu aktual; dan prototipe produk analisis isu aktual dari kasus nyata.	
Keterkaitan Substansi mata Pelatihan	Kegiatan ini terkait pada nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN, yaitu: Kewajiban ASN, <i>Entrepreneurship</i> , Integritas.	
Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Misi Badan Keahlian DPR RI salah satunya adalah 'Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI', dan salah satu tupoksi Pusaka adalah 'Menyajikan hasil analisis, pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI', sehingga kegiatan ini memberikan kontribusi pada kedua hal tersebut.	
Penguatan Nilai BerAKHLAK	Melalui pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya, kegiatan ini terkait pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Kompeten dan Adaptif.	

Kegiatan 3: Implementasi Produk Analisis Insidentil dan Independen

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Dapat dilakukan tiga tahapan kegiatan pada kegiatan ini, yaitu: menyampaikan produk analisis isu aktual ke Analis Legislatif di Pusaka; menyampaikan produk analisis isu aktual ke Kepala Pusaka; dan menyampaikan produk analisis isu aktual ke Sekretariat AKD sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu	Sebagai upaya dalam memitigasi isu yang diangkat, kegiatan ini menghasilkan: dokumen, testimoni/ tanggapan dari Analis Legislatif, Kepala Pusaka, dan Sekretariat AKD atas prototipe produk analisis isu insidentil dan independen yang telah disusun.	
Keterkaitan Substansi mata Pelatihan	Kegiatan ini terkait pada nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN, yaitu: Integritas, Kewajiban ASN, <i>Networking</i> .	
Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Misi Badan Keahlian DPR RI salah satunya adalah 'Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI', dan salah satu tupoksi Pusaka adalah 'Menyajikan hasil analisis, pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI', sehingga kegiatan ini memberikan kontribusi pada kedua hal tersebut.	
Penguatan Nilai BerAKHLAK	Melalui pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya, kegiatan ini terkait pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan dan Harmonis.	

Kegiatan 4: Penyusunan Laporan Rekomendasi terkait Inovasi Produk Analisis yang Bersifat Insidentil dan Independen

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Tahapan kegiatan yang dapat dilakukan adalah: mengolah testimoni/ tanggapan yang didapatkan dalam penyampaian prototipe dokumen analisis isu insidentil dan independen; menyusun draf <i>Standard Operating</i>	

	<i>Procedure</i> (SOP) untuk produk analisis isu aktual; menyusun laporan rekomendasi; dan menyampaikan laporan rekomendasi kepada Kepala Pusaka.	
Output kegiatan terhadap pemecahan Isu	Sebagai upaya dalam memitigasi isu yang diangkat, kegiatan ini menghasilkan: analisis yang mengelaborasi semua tanggapan dan masukan yang diterima, menghasilkan analisis dampak produk tersebut dalam mendukung DPR RI menjalankan tugasnya; draf SOP untuk produk analisis isu aktual; dokumen yang menjabarkan latar belakang penyusunan produk, sistematika penulisan, penyusunan prototipe, penyampaian produk, feedback yang didapatkan, dampak produk, dan rekomendasi tindak lanjut dari prototipe produk tersebut; dan kegiatan penyampaian laporan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti oleh Pusaka.	
Keterkaitan Substansi mata Pelatihan	Kegiatan ini terkait pada nilai-nilai Manajemen ASN dan SMART ASN, yaitu: Peran ASN, Integritas, Kewajiban ASN, <i>Entrepreneurship</i> .	
Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Misi Badan Keahlian DPR RI salah satunya adalah 'Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI', dan salah satu tupoksi Pusaka adalah 'Menyajikan hasil analisis, pendampingan, dan ekspose yang didukung data yang cepat, akurat, dan andal untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan DPR RI', sehingga kegiatan ini memberikan kontribusi pada kedua hal tersebut.	
Penguatan Nilai BerAKHLAK	Melalui pelaksanaan kegiatan beserta tahapannya, kegiatan ini terkait pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, dan Adaptif.	

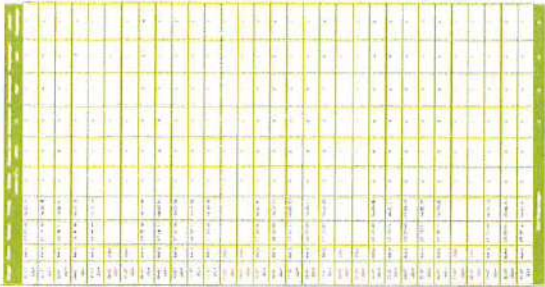
Lampiran 1.b. Formulir Alat Bantu Mentoring Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara

Angkatan : XI
 Nama : Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
 NIP : 199110292024041001
 Instansi : SETJEN DPR RI/PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
 Nama Mentor : Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
 Jabatan Mentor : Analis Legislatif Ahli Madya
 Nilai dari Mentor : 87

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf
1	Cinta Tanah Air	Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia	Menjaga kebersihan lingkungan di tempat kerja	Setjen DPR RI	Setiap waktu		

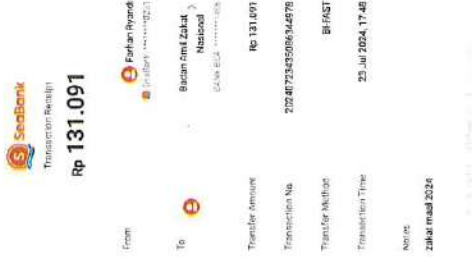
			Menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi	Di mana saja	Saat perjalanan dari atau ke tempat kerja		
	Menjaga nama baik bangsa dan negara	Menjaga etika dalam berinteraksi di media sosial untuk mencegah tersebar informasi negatif tentang Indonesia.	Di mana saja	Setiap waktu			

			Bertindak dengan sopan dan santun	Di mana saja	Setiap waktu		
		Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia	Menggunakan pakaian produksi Indonesia	Di mana saja	Sekali dalam seminggu		
			Menggunakan perlengkapan kerja produksi Indonesia	Di mana saja	Setiap waktu		
2	Sadar Bangsa dan Bernegara	Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.	Membayar pajak	Di mana saja	Setiap tahun		

	Masuk kerja tepat waktu	Setien DPR RI	Setiap waktu		
	Berpartisipasi aktif dalam organisasi, kemasyarakatan, profesi maupun politik	Menjadi anggota Koperasi Pegawai	Setien DPR RI	Setiap waktu	 *** Others *** -Rp .000 ⁰⁰ SMT Gedung Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Jl. Gg. Pahlawan No. 10 Pekanbaru, Riau 78126 SETIEN DPR RI
		Mengikuti kegiatan olahraga, baik dari Korpri maupun Unit Kerja	Sports Center Setien DPR RI	Setiap kegiatan	

3	Setia Kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara	Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	Menyumbangkan barang-barang yang sudah tidak dipakai untuk orang yang lebih memerlukan	Yayasan/ Panti Asuhan	Sekali dalam setahun		
		Senantiasa mengembankan nilai-nilai Pancasila.	Mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79	Setjen DPR RI	Setiap tahun		
			Berpartisipasi dalam kegiatan 17 Agustus di lingkungan rumah	Rumah	Setiap tahun		

4	Rela berkorban untuk bangsa dan negara	Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.	Bersedia menjaga kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kerja	Setjen DPR RI	Setiap waktu		
	Menyusun ringkasan isu sebagai modal awal melakukan analisis di lingkungan pekerjaan			Setjen DPR RI	Setiap saat ketika diperlukan	Pengantar Berbasis Ilmu dan Riset Keras, Kelas 9 Minggu ke-4 Semester 2021/22 September 2022 NIM: 111101170022, ALMA'ULUMMAH NUSANTARA 1401 Himpunan CPNS (not a typical) ASN Forum Berbasis Ilmu dan Riset Keras Berbasis Ilmu dan Riset Keras, Kelas 9 Minggu ke-4 Semester 2021/22 September 2022 NIM: 111101170022, ALMA'ULUMMAH NUSANTARA 1401 Himpunan CPNS (not a typical) ASN Forum Berbasis Ilmu dan Riset Keras Berbasis Ilmu dan Riset Keras, Kelas 9 Minggu ke-4 Semester 2021/22 September 2022 NIM: 111101170022, ALMA'ULUMMAH NUSANTARA 1401 Himpunan CPNS (not a typical) ASN Forum Berbasis Ilmu dan Riset Keras	

		Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan	Menunaikan zakat dan sedekah	Di mana saja	Setiap tahun	 SeaBank Transaction Receipt Rp 131.091 From: [Personal Account] → To: [National Zakat Account] Transfer Amount: Rp 131.091 Transaction No: 20240723430086344978 Transfer Method: BH-FAST Transaction Time: 23 Jul 2024, 17:40 Note: Zakat maal 2024	
			Membantu rekan kerja/tetangga yang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan.	Di mana saja	Setiap saat ketika diperlukan		

5	Mempunyai kemampuan awal bela negara	Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa	Meluangkan waktu untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan	Di tempat ibadah	Setiap hari Jumat		
		Senantiasa menjaga kesehatan	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin	Yankes Setjen DPR RI	Setiap bulan		
			Menerapkan pola hidup sehat (makan makanan bergizi dan menjaga pola tidur)	Di mana saja	Setiap waktu		

Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Coaching

FORMULIR ALAT BANTU

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN TAHUN 2024

Nama : Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
Instansi : SETJEN DPR RI/PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN
NIP : 199110292024041001

Nama Coach : Indra Cakra Buana, M.Si.

No.	Tanggal Berikutnya	Isi atau Hal yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Perbaikan	Tandatangan Coach
1	27 Agustus 2024	Konsultasi Laporan Mingguan minggu 1.	WA	Mencermati poin-poin yang tertera dalam Formulir Pengujian Rancangan Aktualisasi yang telah diisi oleh penguji.	
2	5 September 2024	Konsultasi Laporan Mingguan minggu 2.	WA	Tidak ada perbaikan.	
3	10 September 2024	Konsultasi pelaksanaan aktualisasi, kesulitan dalam mengatur waktu untuk melaksanakan rencana aktualisasi di antara pekerjaan lainnya di unit kerja.	WA	Agar memastikan semua kegiatan dapat dilaksanakan dan menyampaikan kepada rekan kerja di unit kerja bahwa sedang menjalankan pelatihan dasar.	
4	16 September 2024	Konsultasi Laporan Mingguan minggu 3.	WA	Tidak ada perbaikan.	
5	25 September 2024	Konsultasi Laporan	WA	Meninjau kembali poin-poin	

		Mingguan minggu 4.		yang tertera dalam Formulir Pengujian Rancangan Aktualisasi yang telah diisi oleh pengujian agar tidak ada masukan pengujian yang belum terfasilitasi.	
--	--	--------------------	--	---	---

Lampiran 3. Contoh Sistematika Penulisan Produk Analisis Eksisting Isu Sepekan

ISU SEPEKAN^{*)}

Edisi	Minggu ke.. Bulan... 2022 (tanggal... s.d. ...) Contoh: Minggu ke 1 Bulan Februari 2022 (tanggal 28 Januari s.d. 3 Februari)
Komisi	Ditulis dengan Nama Komisi yang terkait dengan Isu Sepekan ini Contoh: Komisi V
Penulis	Nama Lengkap: Jabatan/Bidang: <u>Peneliti Muda/Polhukam</u> Email:@dpr.go.id
Editor	Ditulis dengan nama lengkap editor
Judul	Judul artikel ditulis dengan huruf kapital
Isu/ Permasalahan	Diisi dengan isu atau permasalahan yang bersifat aktual. Ditulis secara sederhana, informatif dan analitis (jumlah kata antara 350 s.d 600 kata).
Atensi DPR	Diisi dengan langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh DPR RI (sebutkan AKD dan Komisi terkait) dalam menindaklanjuti isu atau permasalahan yang terjadi. Dapat ditambahkan fungsi DPR (legislasi, pengawasan, dan anggaran) yang sesuai (jumlah kata antara 100 s.d 150 kata).
Sumber Referensi ^{**)}	Sumber berita ditulis lebih ringkas, hanya berisi media dan tanggal terbit. Contoh: Media Indonesia, 31 Januari 2021; Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022, tempo.co, 4 Februari 2022. RDPU Komisi V tanggal 7 Februari 2022.
Abstrak/ ringkasan untuk ditampilkan di sosmed (Instagram Puslit)	Berisi seripati/ringkasan isi tulisan untuk ditayangkan di Instagram Puslit (jumlah kata antara 100 s.d 130).

KETERANGAN

^{*)} Judul File yang dikirimkan penulis ke editor dan kemudian dari editor ke layouter dan tim website, dan kemudian menjadi pdf setelah di-setting di canva adalah sbh.

IS Bidang Komisi/Bulan Minggu Tahun

Contoh: IS Kesra IX/ Feb2 2022
IS Ekuin V/ Feb3 2022
IS Polhukam II/ Juni1 2022

Lampiran 4. Formulir Penguji Rancangan Aktualisasi

Nama Peserta : Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
Nomor Daftar Hadir : 6
Jabatan : Analis Legislatif Ahli Pertama
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Catatan/Saran:

Hai Mas, terima kasih ya karena sudah memberikan masukan bagi perbaikan Pusaka dalam bentuk RA yang bagus banget. Belum didukung dengan gaya komunikasi Mas Ryan yang komunikatif, ide RA semakin mudah dipahami. Namun ada masukan untuk bisa menyempurnakan RA-nya. Detail ada di catatan saat zoom dan di naskah.

Diskusi kembali dengan mentor dan coach untuk membuat mekanisme / alur kerja dari produk analisis insidentil ini. Kaji kemungkinannya, ukur secara detail apakah memungkinkan jika dilakukan. Harapan saya you can push your limit. Selamat menjalankan habituasi, tetap jalankan core value Ber-AKHLAK. Ganbete 😊

Jakarta, 14 Agustus 2024

PENGUJI,



Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si.
NIP. 197706062009122001

Lampiran 5. Laporan Singkat Aktualisasi Penyusunan Produk Analisis Ringkasan Aktual



LAPORAN SINGKAT AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS MENGENAI PENYUSUNAN PRODUK ANALISIS INSIDENTIL DAN INDEPENDEN PUSAT ANALISIS KEPARLEMENAN – BADAN KEAHLIAN DPR RI

CATATAN/KESIMPULAN

Dengan ini menyampaikan bahwa aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang dilaksanakan dengan judul: Penyusunan Produk Analisis Insidentil dan Independen di Pusat Analisis Keparlemenan (Pusaka) telah menghasilkan rancangan sistematika penulisan dan rancangan *layout* produk analisis insidentil dan independen yang disebut dengan Ringkasan Aktual. Dalam aktualisasi ini juga, telah disusun prototipe Ringkasan Aktual dan rancangan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk produk analisis tersebut.

Rancangan sistematika penulisan dan rancangan layout Ringkasan Aktual yang telah disusun adalah perubahan atas masukan-masukan yang telah diterima. Bersama dengan laporan singkat ini, terlampir 4 (empat) dokumen yang disebutkan di atas. Diharapkan, laporan ini dapat bermanfaat untuk Pusaka dan Analisis Legislatif (Anleg) yang bernaung di dalamnya, sehingga dapat memberikan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI lebih baik lagi ke depannya, serta mempertajam kemampuan analisa Anleg di kemudian hari.

Jakarta, 2 Oktober 2024
Penyusun Laporan,
CPNS Analisis Legislatif Ahli Pertama

Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc.
NIP. 19911029 202404 1 001

Lampiran 1. Rancangan SOP untuk Produk Analisis Ringkasan Aktual

SOP PRODUK ANALISIS RINGKASAN AKTUAL

1. Analis Legislatif Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama dapat menyusun/menulis Ringkasan Aktual.
2. Penyusun/penulis Ringkasan Aktual terdiri dari 1 (satu) orang.
3. *Person In Charge* (PIC) Ringkasan Aktual ditunjuk oleh Koordinator Bidang, paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang.
4. PIC Ringkasan Aktual bertugas untuk mengumpulkan setiap Ringkasan Aktual yang sudah disusun, dan dikoordinasikan kepada Koordinator Bidang.
5. Tidak ada jadwal penugasan penulisan khusus dalam menyusun produk analisis Ringkasan Aktual.
6. Isu yang diangkat dalam penyusunan Ringkasan Aktual adalah isu yang cukup strategis untuk diangkat dan perlu direspon dengan cepat oleh DPR RI, namun tidak cukup strategis untuk dianalisis lebih dalam dan disusun dalam bentuk produk analisis eksisting, seperti Isu Sepekan dan Info Singkat.
7. Ringkasan Aktual disusun dalam 1x24 jam semenjak isu itu muncul di tengah masyarakat yang dapat dihitung semenjak isu itu rilis pada referensi yang menjadi acuan.
8. Penulisan Ringkasan Aktual mengikuti sistematika penulisan dan template layout yang telah disepakati dan dilampirkan dalam SOP ini.
9. Ringkasan Aktual yang telah disusun, disampaikan ke Koordinator Bidang masing-masing Analis Legislatif melalui PIC Ringkasan Aktual di setiap bidang untuk disampaikan kepada Kepala Pusaka agar mendapatkan persetujuan dalam meneruskan ke AKD/Sekretariat AKD terkait isu tersebut dalam waktu 1x24 jam.
10. Setelah mendapatkan ACC, produk analisis Ringkasan Aktual disampaikan kepada AKD/Sekretariat AKD melalui kanal penyampaian yang telah disepakati bersama masing-masing AKD/Sekretariat AKD. Selain itu, Ringkasan Aktual yang telah disusun juga dapat disampaikan ke tim Pusaka yang menangani website dan channel WhatsApp Pusaka.

Lampiran 2a. Rancangan Sistematika Penulisan Produk Analisis Ringkasan Aktual

...JUDUL ISU...

Tanggal	<i>Tanggal Isu Aktual muncul</i>
Komisi	<i>Komisi terkait isu aktual</i>
Penulis	<i>Nama Jabatan Email DPR</i>
Masalah	<i>Diisi dengan ringkasan masalah dari isu yang diangkat, sepanjang 1 paragraf. Ditulis secara sederhana, deskriptif, dan informatif. (jumlah kata antara 35 s.d 70 kata)</i>
Penyebab	<i>Diisi dengan penyebab yang melatarbelakangi munculnya masalah dari isu yang diangkat, sepanjang 1 paragraf. Ditulis secara sederhana, deskriptif, informatif dan analitis. (jumlah kata antara 35 s.d 70 kata)</i>
Dampak	<i>Diisi dengan dampak yang dapat disebabkan oleh isu yang diangkat. Ditulis secara sederhana, deskriptif, informatif dan analitis. (jumlah kata antara 35 s.d 70 kata)</i>
Rekomendasi	<i>Diisi dengan tugas dan fungsi DPR RI (legislasi, pengawasan, dan anggaran) yang cocok untuk menindaklanjuti isu ini, serta jabaran singkat dari langkah yang perlu diambil oleh DPR RI (sebutkan AKD dan Komisi terkait) dalam menindaklanjuti isu atau permasalahan yang terjadi, sepanjang 1 kalimat. (jumlah kata antara 25 s.d 50 kata).</i>
Sumber Referensi ^{*)}	<i>Sumber berita ditulis lebih ringkas, hanya berisi media dan tanggal terbit. Contoh: Media Indonesia, 31 Januari 2021; Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022, tempo.co, 4 Februari 2022. RDPU Komisi V tanggal 7 Februari 2022.</i>

Lampiran 2b. Prototipe Penulisan Produk Menggunakan Sistematika Penulisan Produk Analisis Ringkasan Aktual

Penyelenggaraan MotoGP Masih Butuh Bantuan Pemerintah Pusat

Tanggal	12 September 2024
Komisi	Komisi X
Penulis	Farhan Ryandi, S.Kom., M.Sc. Analis Legislatif Ahli Pertama farhan.ryandi@dpr.go.id
Masalah	Pemerintah Provinsi NTB, BUMN ITDC dan MGPA meminta dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya Kemenparekraf untuk memberikan dukungan terhadap terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 hingga 29 September 2024. Dukungan yang diharapkan berupa pembayaran hosting fee senilai 231 miliar rupiah.
Penyebab	Pemerintah NTB belum dapat membayarkan hosting fee dikarenakan sedang memfokuskan anggaran untuk berpartisipasi di dalam PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024. Kemenparekraf juga adalah pihak yang membayarkan hosting fee MotoGP Mandalika pada tahun 2022 senilai 78,8 miliar rupiah, namun menjadi temuan BPK dengan justifikasi bahwa tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenparekraf.
Dampak	Jika hosting fee tidak dibayarkan kepada Dorna Sports selaku pemegang lisensi olahraga MotoGP, MotoGP seri Mandalika pada tahun 2024 terancam gagal diselenggarakan. Hal ini akan menjadi catatan buruk bagi Indonesia di mata internasional karena telah gagal menjadi tuan rumah penyelenggara event olahraga internasional bergengsi hanya karena dana.
Rekomendasi	Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat meminta Kemenparekraf agar dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 untuk menemukan solusi penyelesaian pembayaran hosting fee sehingga MotoGP dapat diselenggarakan dengan baik.
Sumber Referensi **)	CNN Indonesia, 12 September 2024; Bisnis Indonesia, 9 September 2024.